# BAB II

# ICPO (International Criminal Police Organization) dan NCB (National Central Bureu) Indonesia

Fenomena kejahatan transnasional terorganisir *(Transnational Organized Crime)* / TOC) terus mengemuka dan membutuhkan perhatian serius dari setiap negara. Bentuk-bentuk TOC - seperti; penyelundupan manusia (Human Trafficing), aksi-aksi pembajakan, kejahatan internet (Cyber Crime), terorisme, peredaran narkoba (Drug Trafficking), pencucian uang (Money Loundering), penyelundupan senjata, dan aneka kejahatan ekonomi internasional – semakin berkembang pesat dan telah teridentifikasi sebagai ancaman keamanan baru.

Dalam konsep lama, keamanan merupakan persoalan yang terkait dengan negara (State Survival), sementara TOC melengkapinya dengan menaruh perhatian keamanan sampai pada tingkat individu (Human Security). Dengan demikian, TOC merupakan fokus yang merekatkan negara dan masyarakat. TOC mengancam negara dalam keseluruhan dimensinya dan pada saat yang sama ancaman TOC terkait erat dengan keamanan individu warga negara.

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan negara yang dilewati oleh garis katulistiwa yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah, beragam kebudayaan, adat istiadat,suku, ras,bahasa dan lain-lain. Indonesia merdeka pada tahun 1945 setelah melalui begitu banyak halangan dan rintangan. Setelah merdeka, ada beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari negara indonesia. Namun indonesia tidak begitu saja melepaskan daerah-daerah itu dengan mudah untuk mendirikan negara baru. Keutuhan bangsa dan negara

indonesia harus tetap dijaga secara utuh. Dengan adanya Pancasila, seluruh rakyat indonesia yang berasal dari beragam latar belakang kebudayaan, adat istiadat, suku, ras, dan bahasa dapat dipersatukan.

## ICPO *(International Criminal Police Organization)*

### Sejarah Terbentuknya*International Criminal Police Organization* (ICPO)

Interpol adalah organisasi polisi kriminal internasional. Kata 'Interpol' berasal dari dua kata 'internasional' dan 'polisi' atau Komisi Kepolisian Internasional. Interpol adalah organisasi ketat non-politik, non-agama, non-rasial di mana pasukan polisi lebih dari seratus negara yang berbeda bekerja sama satu sama lain. Kantor pusat interpol terletak di Paris.

Tugas dari Interpol adalah untuk melacak penjahat. Menurut hukum internasional, polisi dari satu negara tidak bisa masuk ke wilayah negara lain untuk menangkap seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan atau telah melarikan diri ke sana. Interpol membantu dalam situasi seperti ini untuk menelusuri para penjahat. Setiap negara memiliki perwakilan nya di Interpol.

Sejak awal abad ke XIX, kerjasama antar negara dalam penyidikan kejahatan mulai dirintis, mengingat modus operandi kejahatan yang telah berkembang, dimana seorang tersangka setelah melakukan kejahatan di suatu negara tertentu, dapat melarikan diri melampaui batas wilayah negara sehingga sulit untuk melakukan penangkapan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan kerjasama dengan negara lain.

Sebagai contoh kasus, pada awal tahun 1991, telah terjadi perampokan yang didahului dengan pembunuhan di Bank Dagang Negara Cabang Batam, sehingga mengakibatkan seorang satpam meninggal dunia. Dari hasil penyidikan telah tertangkap 5 (lima) orang tersangka yang seluruhnya warga negara Malaysia. Dari pengembangan penyidikan diketahui bahwa otak dari perampokan tersebut adalah seorang warga negara Singapura yang kemudian berhasil melarikan diri ke negara asalnya. Berkat kerjasama yang baik antara Polri dengan Kepolisian Singapura, dalam waktu yang relatif singkat, tersangka berhasil ditangkap dan ditahan di Kepolisian Singapura.

Permasalahan yang timbul dalam proses penyidikan lebih lanjut adalah bagaimana penyerahan tersangka kepada Indonesia sedangkan antara Indonesia dan Singapura tidak ada perjanjian ekstradisi, mengingat bahwa *locus delicti* dan alat-alat bukti yang sah berada di Indonesia sedangkan tersangka berada dibawah kekuasaan Kepolisian Singapura. Melihat banyaknya permasalahan yang timbul, salah satunya seperti yang terurai di atas, kita menyadari betapa sangat pentingnya kerjasama antar negara atau kerjasama antar kepolisian dalam penyidikan kejahatan. Alasan inilah yang menjadi titik tolak lahirnya organisasi internasional yang bergerak dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional, yaitu dengan lahirnya ICPO-Interpol.

*International Criminal Police Organization* atau yang lebih dikenal dengan alamat telegraf listriknya, Interpol, adalah organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerjasama antar kepolisian di seluruh dunia. Jadi, Interpol bukan merupakan singkatan dari International Police, tetapi merupakan kata sandi yang dipergunakan dalam komunikasi internasional antar anggota.[[1]](#footnote-2)

Sebagai titik tolak, perlu diteliti apakah ICPO-Interpol itu adalah “Polisi Internasional” atau detektif internasional, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita tinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu :[[2]](#footnote-3)

* 1. Arti istilah ‘Polisi’

Sebagaimana diketahui arti istilah polisi harus dibedakan antara “ polisi sebagai fungsi dan “polisi sebagai “organ”. Polisi sebagai tugas pada pokoknya menunjuk pada tugas untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat dipelihara dan dijamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tersebut. Sedangkan polisi sebagai organ menunjuk pada organ di dalam masyarakat atau negara yang mempunyai tugas sebagaimana disebut di atas, yang di dalam hal-hal tertentu diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. Dari gambaran tersebut, kiranya jelas tidak dapat dipisahkan antara polisi sebagai tugas maupun sebagai organ dengan masyarakat atau dengan perkataan lain tidak mungkin adanya masyarakat tanpa polisi.

* 1. Karakteristik masyarakat internasional.

Berdasarkan hukum internasional terdapat 2 (dua) teori tentang masyarakat internasional :

1. *Teori Universalisme*, bahwa masyarakat internasional adalah suatu masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang mendiami permukaan bumi, karena itu sebagai umat manusia merupakan satu kesatuan. Teori ini menitikberatkan kepada hal-hal yang sama yang memiliki individu-individu dan karenanya menjadi dasar dari ikatan-ikatan yang menghubungkan mereka satu sama lain.
2. Karena di atas individu-individu banyak organisasi dimana setiap individu pasti menjadi anggotanya dan dalam perkembangan modern ini, organisasi yang paling tinggi tingkatannya adalah negara, maka timbul teori yang kedua yang menyatakan bahwa masyarakat internasional adalah masyarakat yang terdiri dari negara-negara.

Dalam hubungan dengan teori-teori tersebut di atas yang pada umumnya merupakan pendapat para sarjana hukum internasional mengenai karakteristik masyarakat internasional antara lain dapat ditonjolkan:

* + 1. Bahwa dalam masyarakat internasional tidak ada kekuasaan (politik) yang tertinggi yang dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa terhadap subjek-subjek hukum internasional lainnya.
    2. Bahwa dalam masyarakat internasional, negara-negara melaksanakan kedaulatannya sesuai dengan kepentingan masing-masing.
    3. Bahwa dalam masyarakat internasional, amsing-masing Negara mempunyai angkatan bersenjata, melaksanakan perang sebagai tindakan hukum terhadap negara-negara yang dianggap bersalah.
  1. Karakteristik Hukum Internasional

Dapat dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, maka sumber hukum internasional terdiri dari : [[3]](#footnote-4)

1. Perjanjian-perjanjian internasional *(international treaties).*
2. Kebiasaan internasional, yang terbukti dari praktek umum yang telah diterima sebagai hukum.
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
4. Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan dan kaidah hukum.

Selanjutnya gagasan-gagasan tentang dasar-dasar berlakunya hukum internasional mengarah pada 2 (dua) teori sebagai berikut :

1. Teori Voluntaris yang pada dasarnya berusaha menerangkan bahwa hukum internasional mengikat negara-negara atas dasar kehendak dari negara-negara tersebut.
2. Teori Objektivitas yang pada dasarnya berusaha untuk membuktikan bahwa dasar hukum internasional terlepas dari kehendak negara-negara.

Dari kedua teori tersebut di atas, yang dominan adalah pendapat kelompok pertama, dan dengan demikian maka karakteristik hukum internasional dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa daya berlakunya hukum internasional banyak bergantung pada itikad baik subjek-subjek hukumnya.
2. Hukum internasional tidak mempunyai sanksi-sanksi yang mengikat.
3. Hukum internasional bersifat pragmatis.
4. Intervensi hukum internasional tidak otomatis.

Dilihat dari uraian tersebut di atas, maka jelas ada perbedaan dalam pengertian dan hubungannya antara hukum dan masyarakat serta hukum internasional, sehingga jelas dalam skala internasional tidak mungkin ada “polisi internasional”. Dengan demikian ICPO-Interpol tidak dapat diartikan sebagai polisi internasional atau detektif internasional.

### Sejarah singkat pembentukan ICPO

Sejarah pembentukan interpol dimulai Setelah Perang Dunia Pertama, kejahatan meningkat pesat di Eropa, khususnya di Austria. Setelah melakukan kejahatan, penjahat yang digunakan untuk pergi ke beberapa negara tetangga dan menyembunyikan diri mereka di sana. Dalam rangka untuk menangkap penjahat tersebut, Johann Scober, Kapolres Wina, yang membuat pertemuan pejabat polisi dari berbagai negara pada tahun 1923. Saat itu di pertemuan ini ada dua puluh negara bersama-sama mendirikan Interpol. Kantor pusat pertamanya ada di Wina dan Johann menjadi presiden pertama.

Pada tahun 1938 Jerman menginvasi Austria dan dengan ini masa-masa Interpol tidak berkembang. tetapi Selama Perang Dunia Kedua Interpol tetap aktif. Setelah Perang ini, Flaurent Lovagay, Inspektur Jenderal Polisi Belgia menghidupkan kembali interpol. Karena tidak tersedianya fasilitas yang diperlukan di Belgia, kantor pusat Interpol tidak bisa didirikan di sana. Paris menjadi kantor pusatnya yang baru. Pada tahun 1955, lima puluh lima negara menjadi anggota Interpol. Pada tahun 1956, Interpol diberi konstitusi baru.

Interpol membuat Penggunaan cara-cara ilmiah yang paling modern untuk menangkap penjahat. Untuk melacak dan menangkap pelaku kejahatan adalah satu-satunya fungsi organisasi ini. Hal ini tidak dapat digunakan untuk kegiatan politik, militer atau agama.

INTERPOL dilahirkan pada tahun 1914 di Kongres Internasional pertama kriminal kepolisian, diadakan di Monako. Secara resmi dibuat pada tahun 1923 sebagai Komisi polisi kriminal internasional, organisasi dikenal sebagai INTERPOL pada tahun 1956. Pada tahun 1914 Kongres polisi kriminal internasional pertama diadakan di Monako. Polisi, pengacara dan hakim dari 24 negara bertemu untuk membahas prosedur penangkapan, teknik identifikasi, terpusat catatan kriminal internasional dan proses pengadilan ekstradisi. Pada 1923 Penciptaan dari Komisi polisi kriminal internasional (ICPC) dengan kantor pusat di Vienna, Austria, atas prakarsa Dr Johannes Schober, Presiden polisi Wina. Pada 1926 Majelis Umum, diselenggarakan di Berlin, mengusulkan bahwa masing-masing negara menetapkan titik pusat kontak dalam struktur polisi: pendahulu Biro Pusat Nasional (NCB).

Pada 1927 Resolusi untuk mendirikan NCB dimulai. Pada 1930 Departemen khusus dibentuk untuk berurusan dengan pemalsuan uang, catatan kriminal dan pemalsuan paspor. Pada 1932 Setelah kematian Dr Schober, undang-undang baru diletakkan di tempat yang menciptakan jabatan Sekretaris Jenderal. Yang pertama adalah Komisaris Polisi Austria Oskar Dressler. Pada 1935 Jaringan radio internasional organisasi diluncurkan, menyediakan sistem telekomunikasi independen semata-mata untuk penggunaan penguasa kriminal kepolisian di tingkat nasional.

Pada 1938 Nazi menganggap kontrol setelah memecat Presiden Michael Skubl. Sebagian besar negara berhenti berpartisipasi dan ICPC secara efektif berhenti sebagai sebuah organisasi internasional. Pada 1942 ICPC benar-benar jatuh di bawah kendali Jerman dan pindah ke Berlin. Pada 1946 Belgia memimpin pembangunan kembali organisasi setelah akhir Perang Dunia II. Markas baru di Paris, dan 'INTERPOL' dipilih sebagai organisasi Telegraphic. Melembagakan proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Komite Eksekutif.

Pada 1949 Perserikatan Bangsa-bangsa memberikan status konsultatif INTERPOL sebagai sebuah organisasi non-pemerintah. Pada 1956 setelah adopsi Konstitusi dimodernisasi, ICPC menjadi internasional kriminal kepolisian organisasi-INTERPOL, disingkat ICPO-INTERPOL atau hanya INTERPOL. Organisasi menjadi otonom dengan mengumpulkan iuran dari negara-negara anggota dan bergantung pada investasi sebagai sarana utama dukungan. Pada 1958 Kontribusi dari negara-negara anggota yang direvisi dan peraturan keuangan yang diadopsi. Pada 1963 Konferensi regional pertama diadakan, di Monrovia, Liberia. Pada 1965 Majelis Umum menetapkan tanggung jawab formal dan kebijakan operasi untuk NCBs.

Pada 1971 Perserikatan Bangsa-bangsa mengakui INTERPOL sebagai organisasi antar pemerintah. Pada 1972 Markas perjanjian dengan Perancis mengakui INTERPOL sebagai organisasi internasional. Pada 1982 Badan independen dibuat untuk memantau pelaksanaan INTERPOL peraturan internal berkaitan dengan perlindungan data. Pada 1989 INTERPOL bergerak Sekretariat Jendralnya ke Lyon, Prancis.

Pada 1990 X.400 komunikasi sistem diluncurkan, memungkinkan NCBs untuk mengirim pesan elektronik untuk satu sama lain dan Sekretariat Jenderal langsung. Pada 1992 Fasilitas pencarian otomatis untuk remote pencarian database INTERPOL diperkenalkan. Pada 1995 Sebagai bagian dari program regionalisasi Majelis Umum mengadopsi pedoman untuk pembentukan dan operasi dari biro daerah. Pada 1998 INTERPOL pidana informasi sistem (ICI) database dibuat. Pada 2002 Sistem komunikasi berbasis web 24/7 yang diluncurkan, secara signifikan meningkatkan NCBs' akses ke INTERPOL database dan layanan. Kanada adalah negara pertama yang terhubung ke sistem. Pada 2003 Pelantikan resmi perintah dan pusat koordinasi Sekretariat Jenderal, memungkinkan organisasi untuk beroperasi 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Pada 2004 Kantor penghubung INTERPOL pertama diresmikan di PBB di New York dan perwakilan khusus ditunjuk.

Pada 2005 Pertama INTERPOL-United bangsa khusus pemberitahuan dikeluarkan untuk individu tunduk pada sanksi PBB menentang Al Qaeda dan Taliban. Teknologi yang dikenal sebagai pikiran menemukan memungkinkan garis depan perwira untuk terhubung langsung ke sistem INTERPOL. Pada 2009 Peresmian Kantor dari perwakilan khusus untuk Uni Eropa di Brussels. Pada 2015 Pelantikan resmi dari INTERPOL Global kompleks untuk inovasi di Singapura. Ia bekerja untuk memerangi cybercrime dan membantu polisi di sekitar alamat dunia muncul ancaman melalui inovasi dan pelatihan.[[4]](#footnote-5)

### Struktur Organisasi ICPO

Kekuasaan tertinggi dalam organisasi ICPO terletak pada Majelis Umum dan Komite Eksekutif, organ ini memberikan pertimbangan dan mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan pengawasan. Selain itu juga mengadakan pertemuan secara berkala. Departemen - departemen terdapat pada Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan-keputusan dan rekomendasi yang telah disahkan oleh organ tertinggi tersebut serta mempunyai hubungan yang erat dengan masing-masing NCB dari Negara anggota dalam rangka melaksanakan kerjasama kepolisian. NCB merupakan badan nasional yang bertanggung jawab sebagai penghubung antara Negara anggota dan Sekretariat Jendral. Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar ICPO, maka struktur organisasi ICPO adalah sebagai berikut :

General Assembly

( Majelis Umum)

General Secretariat

(Sekretariat Jendral )

National Central Bureau

(Biro Pusat Nasional)

Executive Committee

(Komite Eksekutif)

The Commission For The Control Of Interpol File’s

( Komisi Pengawasan Interpol File )

Adviser’s

(Penasehat)

### Fungsi ICPO

#### Prinsip Dasar Interpol

Dalam penanganan kejahatan internasional, seperti yang telah diuraikanpada bab pendahuluan, diperlukan kerjasama internasional karena tidak adasatupun negara di dunia yang dapat memerangi kejahatan internasional sendirian.Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan yang timbul dalam halpenanggulangan kejahatan berdimensi internasional, antara lain :[[5]](#footnote-6)

1. Keterbatasan kewenangan sesuai batas negara dan yurisdiksi.

Kewenangan aparat penegak hukum didalam melakukan kegiatan penegakan hukum dibatasi oleh suatu wilayah yang berdaulat penuh sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain, para pelaku kejahatan dapat bergerak dengan lebih bebas melewati batas negara sepanjang didukung dengan dokumen keimigrasian yang memadai. Pada umumnya kecepatan gerak penegak hukum jauh tertinggal dari kegesitan pelaku baik dalam upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Karena meskipun telah ada kesepakatan kerjasama untuk menangani kejahatan, namun dalam pelaksanaannya harus melalui proses birokrasi yang sulit.

1. Perbedaan sistem hukum

Kendala yuridis lebih disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara negara anggota. Ada negara yang menganut sistem kontinental dan ada pula yang menganut sistem anglo saxon. Perbedaan besar terutama terdapat dalam sistem peradilan pidana yaitu ada yang menganut due process model (lebih menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana) dan ada yang memilih crime control model (menekankan efisiensi dan efektifitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah) lebih menitikberatkan pada proses yang lebih praktis. Dalam perspektif criminal procedure (hukum acara pidana), Hebert L Packer dalam The Limited of the Criminal Sanction mengemukakan dua model dalam beracara. Kedua model itu adalah crime control model dan due process model. Crime control model memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan presumption of guilt (praduga bersalah) sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Crime control model ini diumpamakan seperti sebuah bola yang digelindingkan dan tanpa penghalang. Sementara due process model memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan presumption of innocent (praduga tidak bersalah) sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Persoalan yuridis lain adalah berkenaan dengan masalah kriminalisasi jenis-jenis kejahatan internasional. Belum semua negara sudah mampu menerapkan undang-undang untuk memerangi kejahatan internasional.

1. Perjanjian antara negara belum memadai.
   1. Perjanjian ekstradisi Perjanjian ekstradisi diantara negara-negara masih sangat terbatas. Upaya untuk mengembangkan perjanjian ekstradisi dengan negara lain tidaklah mudah, karena sering terbentur dengan adanya konflik interest dari masing-masing negara. Selain itu, sekalipun sudah ada perjanjian ekstradisi, dalam kenyataannya proses penyerahan seorang pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain, biasanya melalui suatu proses yang sangat lama, bahkan sampai lebih dari satu tahun. Oleh karenanya faktor perjanjian ekstradisi memerlukan kecermatan dalam penanganannya sehingga tidak krusial sebagai penghambat proses penanganan kejahatan yang berlingkup lintas negara.
   2. Perjanjian bantuan timbal balik dibidang proses pidana Bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi, masih terbuka kemungkinan terjadinya penyerahan seorang pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain dapat melalui apa yang dinamakan mutual legal assistance in criminal matters, yaitu upaya memberikan bantuan kerjasama penerapan hukum dalam penanganan kasus kriminal yang biasanya dilakukan dengan asas resiprositas (timbal balik). Namun penerapan dengan cara ini terkadang dikritik sebagai suatu tindakan yang menyalahi aturan hukum lainnya misalnya tentang perlindungan HAM.[[6]](#footnote-7) Kerjasama kepolisian internasional dalam wadah Interpol selalu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
2. Menghormati kedaulatan negara. Kerjasama didasarkan pada tindakan yang diambil oleh kepolisian negara anggota, dilaksanakan dalam batas dan undang-undang negara masing-masing.
3. Penegakan hukum dari undang-undang kejahatan. Bidang kegiatan organisasi dibatasi pada pencegahan kejahatan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan kejahatan hukum. Inilah satu-satunya yang menjadi dasar perjanjian di antara semua negara anggota.
4. Universalitas. Setiap negara anggota dapat bekerjasama dengan negara anggota lainnya dan faktor geografi atau bahasa tidak boleh menghalangi kerjasama.
5. Persamaan di antara semua negara anggota. Semua negara anggota diberikan pelayanan yang sama dan mempunyai hak yang sama, tanpa mengindahkan kontribusi keuangan kepada organisasi.
6. Kerjasama dengan badan-badan lain. Kerjasama diperluas melalui NCB (National Central Bureau) dengan badan badan yang bertugas dibidang penanganan kejahatan negara masing-masing.
7. Metode kerja fleksibel. Walaupun telah diatur oleh prinsip-prinsip untuk menjamin keteraturan dan kelanjutan kerjasama, namun Interpol bekerja secara fleksibel dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan struktur dan situasi suatu negara anggota.

Berdasarkan prinsip-prinsip ini berarti Interpol tidaklah merupakan tim yang mempunyai kekuasaan supranasional yang dapat bergerak keliling dunia untuk mengadakan penyidikan di setiap negara anggotanya. Kerjasama kepolisian internasional tergantung pada kegiatan koordinasi diantara kepolisian Negara-negara anggota, dimana semua negara dapat saling meminta atau memberikan informasi atau pelayanan lain dalam masalah-masalah yang diperlukan. Setiap organisasi yang dibentuk pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Menurut Pasal 2 Anggaran Dasar ICPO-Interpol, maka yang menjadi tujuan didirikannya Interpol adalah:

* + 1. Menjamin dan mengembangkan kerjasama yang seluas-luasnya antara semua polisi reserse, dalam batas undang-undang suatu negara dan dengan semangat Declaration of Human Rights yang universal.
    2. Membangun dan mengembangkan lembaga-lembaga yang memberikan kontribusi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Pembatasan dari kegiatan Interpol terdapat dalam Pasal 3 anggaran dasar yaitu : “Dilarang keras bagi organisasi untuk ikut campur atau melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan politik, militer, agama atau rasial” Pasal 2 ICPO-Interpol

***Constitution***

Sesuai dengan interpretasi yang diberikan oleh Pasal 3, kejahatan politik adalah sesuatu yang dipertimbangkan sebagai keadaan kekuasaan politik karena keadaan dan motif yang melingkupinya, bahkan jika kejahatan tersebut telah tercakup dalam undang-undang kejahatan suatu negara, dimana kejahatan itu terjadi. Interpretasi ini, didasarkan pada aspek yang dominan dari kejahatan, selanjutnya disahkan dalam resolusi Sidang Umum Interpol tahun 1951. Sebagai tambahan, resolusi tahun 1984 menyatakan bahwa secara umum kejahatan tidak dipertimbangkan sebagai kejahatan politik jika kejahatan terjadi di luar daerah konflik dan jika korban tidak ada hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku kejahatan.

#### Tugas-tugas dasar Interpol

Sebagai suatu organisasi internasional, ICPO menjalankan fungsifungsinya sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya atau konstitusi yang mendirikannya, yang menjadi tugas-tugas Interpol adalah:

1. Sebagai alat penyampaian informasi dan penemuan-penemuan baru, dengan menerbitkan :
   1. *Interpol Review* (majalah bulanan).
   2. *Counterfeit and Forgery Index*, yaitu berupa Informasi dan ciri-ciri uang palsu dan yang dipalsukan.
   3. Brosur-brosur hasil riset yang dilakukan oleh Interpol baik tentang metode pencegahan dan pemberantasan kejahatan maupun modus operandi kejahatan internasional.
   4. *Interpol Notices*
2. Memberikan pelatihan kepada badan kepolisian dari negara-negara anggotanya.

Interpol membantu dengan memberikan latihan-latihan kepada polisipolisi negara anggota. Dalam hal ini unit latihan di lakukan di Sekretariat Jenderal. Unit pelatihan ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengadakan, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk tentang seminar latihan tahunan bagi pejabat maupun NCB negara-negara anggota. Secara periodik, Sekretariat Jenderal juga mengadakan simposium untuk para kepala-kepala pendidikan dan latihan kepolisian untuk mendiskusikan berbagai aspek latihan kepolisian seperti kode etik dan kerjasama internasional.

1. Menyiapkan dan mengedarkan studi-studi dan laporan di bidang hukum serta permasalahan teknis yang berhubungan dengan aktifitas kepolisian di negara masing-masing.
2. Dalam pra ekstradisi, Interpol dapat menyebarluaskan permintaan pencarian, penahanan tersangka dan mengeluarkan surat penangkapan dan selanjutnya tersangka akan diekstradisi. Dalam hal ini, sesuai dengan yang tercantum dalam European Extradition Convention tahun 1957, instansi terkait dapat menggunakan sarana Interpol untuk mengirimkan permintaan penahanan sementara. Divisi III akan mengirimkan kepada setiap negara anggotanya surat edaran yang menggambarkan langkah-langkah kepolisian yang harus diambil dalam mencari tersangka.
3. Menerbitkan laporan berkala tentang kecenderungan terhadap kejahatan baru dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menanggulanginya.
4. Mengadakan simposium forensik untuk keperluan penyidikan seperti identifikasi orang dan barang-barang bukti.

Kerjasama kepolisian internasional ini meliputi semua jenis aktivitas kejahatan dengan cabang-cabang internasional yang penting seperti:

1. Kejahatan terhadap orang. Seperti pembunuhan, penganiayaan berat, perkosaan, penculikan, penyanderaan dan kejahatan terhadap anak sering menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara karena seingkali penjahat melakukan pelanggaran dalam suatu negara namun berlindung di negara lain.
2. Kejahatan terhadap harta benda, Perampokan bank atau pencurian kendaraan, perdagangan kendaraan bermotor curian, pencurian dokumen identitas dan dokumen perjalanan, pencurian karya seni, perdagangan satwa yang dilindungi. Kejahatan ini sering dilakukan oleh sindikat pencuri yang beroperasi di beberapa negara atau para spesialis internasional yang berkemampuan tinggi. Pencurian karya-karya seni diberikan perhatian khusus karena efek yang ditimbulkan oleh pencurian-pencurian seperti itu. Oleh karena itu, Interpol memiliki file khusus untuk pencurian benda-benda seni dan mengedarkannya kepada negara-negara anggota. Sebagai tambahan, setiap 2 tahun sekali Sekretariat Jenderal menerbitkan poster dengan foto dan penjelasan dari benda-benda seni yang dicari agar mendapat perhatian dari masyarakat internasional.
3. Kejahatan terorganisir dan terorisme, serta kaitannya dengan peredaran narkotika dan senjata. Pada bulan Januari 1990, Interpol membentuk kelompok khusus yang bertujuan untuk menangani berbagai aspek kejahatan terorganisir secara lebih cermat. Dalam hal pemberantasan terorisme internasional, telah diterbitkan pedoman untuk penanggulangan terorisme internasional yang hanya diedarkan untuk negara anggota saja.
4. Peredaran gelap senjata api, yang digunakan untuk tujuan-tujuan kejahatan. Interpol memiliki database yang berisi informasi-informasi tentang perdagangan dan peredaran senjata api. Database ini bernama *Interpol Trafficking Arms Syst*em dan *Interpol Explosive Incident System*.
5. Perdagangan manusia dan eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak-anak, yang sudah menjadi pelanggaran yang berskala internasional.
6. Kejahatan penerbangan sipil yang membahayakan penerbangan, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hague 1970. Demikian juga seperti yang tercantum dalam Konvensi Montreal 1971 mengenai pengaturan untuk menjaga keamanan penerbangan.
7. Pemalsuan uang. Pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang telah dibahas oleh Interpol sejak didirikan pada tahun 1923. Interpol telah memainkan peranan yang penting dalam konvensi internasional 1929 tentang pencegahan uang palsu. Interpol juga pernah menyelenggarakan konferensi baik internasional maupun regional tentang uang palsu dan dokumen palsu yang dihadiri oleh kepolisian dan pihak-pihak swasta.
8. Identifikasi, pelacakan dan penyitaan aset yang berasal dari kejahatan. Informasi tentang perpindahan aset kejahatan, perdagangan obat terlarang, kejahatan terorisme dan kejahatan di bidang perdagangan adalah tanggungjawab kelompok khusus Interpol yaitu Sub Divisi I. Kelompok ini dilibatkan dalam Dewan Konvensi Eropa mengenai pencucian uang, penangkapan dan penyitaan hasil-hasil kejahatan. Setiap bulan diterbitkan buletin yang berisi informasi tentang pencucian uang yang berasal dari kegiatan ilegal.
9. Kasus perdagangan barang-barang berharga (emas, permata, dan lain-lain) atau pemalsuannya dapat ditanggulangi oleh kerjasama internasional ini.
10. Penipuan merupakan suatu masalah yang meliputi pelanggaran ekonomi secara luas dan mempunyai aspek-aspek internasional. Contohnya seperti penjualan saham fiktif, pemalsuan cek dengan menggunakan identitas palsu, pembajakan hak cipta dan lain-lain.
11. Perdagangan narkotika. Sub Divisi Narkotika mengoperasikan suatu sistem pelaporan intelijen yang efektif dan menguntungkan negara anggota, menyoroti kasus-kasus penyitaan narkotika dalam jumlah besar dan mempelajari kecenderungan-kecenderungan baru dari penyalur, jenis narkotika yang disita, modus operandi yang digunakan dan jalur yang dilalui peredaran gelap narkotika.

### Anggota Komite Eksekutif ICPO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **President** | | |  |
|  | Meng Hongwei  **Asia** MENG Hongwei (China) 2016-2020 | | |  |
|  | **President** | |  |
|  | Meng Hongwei  **Asia** MENG Hongwei (China) 2016-2020 | |  |
|  | **Vice-Presidents** | |  |
| Jong-Yang-KIM_KOREA  **Asia** KIM Jong Yang (Republic of Korea) 2015-2018 | NDEITUNGA Sebastian Haitota  **Africa** Sebastian Haitota NDEITUNGA (Namibia) 2014-2017 | Alexander PROKOPCHUK  **Europe** Alexander PROKOPCHUK (Russia) 2016-2019 | Todd-SHEAN_Canada  **Americas** Todd SHEAN (Canada) 2015-2018 |
|  | **Delegates** |  |  |
| David ARMOND  **Europe** David ARMOND (UK) 2014-2017 | Catherine-DE-BOLLE_BELGIUM_  **Europe** Catherine DE BOLLE (Belgium) 2015-2018 | Matyas-Hegyaljai-HUNGARY  **Europe** Mátyás HEGYALJAI (Hungary) 2016-2017 | Jolene-LAURIA_USA_ID  **Americas** Jolene LAURIA (United States) 2015-2018 |
| Anselm-Lopez  **Asia** Anselm LOPEZ (Singapore) 2015-2018 | Francis Ndegwa  MUHORO  **Africa** Francis Ndegwa  MUHORO (Kenya) 2014-2017 | Anbuen NAIDOO  **Africa** Anbuen NAIDOO (South Africa) 2015-2018 | Nestor-Ramon-Roncaglia-ARGENTINA  **Americas** Néstor RONCAGLIA (Argentina) 2016-2017 |

### Negara-negara yang tergabung dalam Keanggotaan ICPO-Interpol

Interpol saat ini beranggotakan sekitar 190 negara yang tersebar di seluruh dunia. Masing-masing Negara memiliki NCB (National Central Bureau) dengan petugas dari para penegak hukum nasional. Mereka menjaga hubungan dengan *INTERPOL’s Global Network*, sehingga memungkinkan setiap Negara anggota untuk bekerja sama dalam investigasi lintas batas (*cross-border investigations*). NCB sangat berperang penting dalam memaksimalkan kinerja organisasi. Adapun Negara-negara yang tergabung dalam ICPO-Interpol antara lain :

**Tabel 1 Daftar Negara-negara Anggota ICPO-Interpol [[7]](#footnote-8)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Afghanistan | 9 | Aruba | 17 | Belarus |
| 2 | Albania | 10 | Australia | 18 | Belgium |
| 3 | Algeria | 11 | Austria | 19 | Belize |
| 4 | Andorra | 12 | Azerbaijan | 20 | Benin |
| 5 | Angola | 13 | Bahamas | 21 | Bhutan |
| 6 | Antigua & Barbuda | 14 | Bahrain | 22 | Bolivia |
| 7 | Argentina | 15 | Bangladesh | 23 | Bosnia and Herzegovina |
| 8 | Armenia | 16 | Barbados | 24 | Botswana |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Brazil | 33 | Cape Verde | 41 | Congo (Democratic R) |
| 26 | Brunei | 34 | Central African Republic | 42 | Costa Rica |
| 27 | Bulgaria | 35 | Chad | 43 | Croatia |
| 28 | Burkina Faso | 36 | Chile | 44 | Cuba |
| 29 | Burundi | 37 | China | 45 | Curacao |
| 30 | Cambodia | 38 | Colombia | 46 | Cyprus |
| 31 | Cameroon | 39 | Comoros | 47 | Czech Republic |
| 32 | Canada | 40 | Congo | 48 | Cote d’lvoire |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Denmark | 57 | Eritrea | 65 | Gambia |
| 50 | Djibouti | 58 | Estonia | 66 | Georgia |
| 51 | Dominica | 59 | Ethiopia | 67 | Germany |
| 52 | Dominican Republic | 60 | Fiji | 68 | Ghana |
| 53 | Ecuador | 61 | Finland | 69 | Greece |
| 54 | Egypt | 62 | Former Yugoslav R.O.M | 70 | Grenada |
| 55 | El Savador | 63 | France | 71 | Guatemala |
| 56 | Equatorial Guinea | 64 | Gabon | 72 | Guinea |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Guinea Bissau | 81 | Iran | 89 | Kazakhstan |
| 74 | Guyana | 82 | Iraq | 90 | Kenya |
| 75 | Haiti | 83 | Ireland | 91 | Korea |
| 76 | Honduras | 84 | Israel | 92 | Kuwait |
| 77 | Hungary | 85 | Italy | 93 | Kyrgyzstan |
| 78 | Iceland | 86 | Jamaica | 94 | Laos |
| 79 | India | 87 | Japan | 95 | Latvia |
| 80 | Indonesia | 88 | Jordan | 96 | Lebanon |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Lesotho | 114 | Monaco | 131 | Panama |
| 98 | Liberia | 115 | Mongolia | 132 | Papua New Guinea |
| 99 | Libya | 116 | Montenegro | 133 | Paraguay |
| 100 | Liechtenstein | 117 | Morocco | 134 | Peru |
| 101 | Lithuania | 118 | Mozambique | 135 | Philippines |
| 102 | Luxemborg | 119 | Myanmar | 136 | Poland |
| 103 | Madagascar | 120 | Namibia | 137 | Portugal |
| 104 | Malawi | 121 | Nauru | 138 | Qatar |
| 105 | Malaysia | 122 | Nepal | 139 | Romania |
| 106 | Maldives | 123 | Netherlands | 140 | Russia |
| 107 | Mali | 124 | New Zealand | 141 | Rwanda |
| 108 | Malta | 125 | Nicaragua | 142 | Samoa |
| 109 | Marshall Islands | 126 | Niger | 143 | San Mario |
| 110 | Mauritania | 127 | Nigeria | 144 | Sao Tome & Principe |
| 111 | Mauritius | 128 | Norway | 145 | Saudi Arabia |
| 112 | Mexico | 129 | Oman | 146 | Senegal |
| 113 | Moldova | 130 | Pakistan | 147 | Serbia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | Seychelles | 164 | Swaziland | 179 | Ukraine |
| 149 | Sierra Leone | 165 | Sweden | 180 | United Arab Emirates |
| 150 | Singapore | 166 | Switzerland | 181 | United Kingdom |
| 151 | Sint Maarten | 167 | Syria | 182 | United States |
| 152 | Slovakia | 168 | Tajikistan | 183 | Uruguay |
| 153 | Slovenia | 169 | Tanzania | 184 | Uzbekistan |
| 154 | Somalia | 170 | Thailand | 185 | Vatican City State |
| 155 | South Africa | 171 | Timor Leste | 186 | Venezuela |
| 156 | South Sudan ( Rep.of) | 172 | Togo | 187 | Vietnam |
| 157 | Spain | 173 | Tonga | 188 | Yemen |
| 158 | Sri Lanka | 174 | Trinida & Tobago | 189 | Zambia |
| 159 | St Kitts & Nevis | 175 | Tunisia | 190 | Zimbabwe |
| 160 | St Lucia | 176 | Turkey |  |  |
| 161 | St Vincent& Grenadines | 177 | Turkmenistan |  |  |
| 162 | Sudan | 178 | Uganda |  |  |

### Kedudukan ICPO sebagai Organisasi Internasional

Leroy Bennet, mengemukakan ada 5 ciri-ciri yang dimiliki oleh organisasi internasional sebagai pembatasan apa yang dimaksud dengan organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi permanen untuk melakasanakan fungsi-fungsi yang berkesinambungan;
2. Keanggotaan yang sukarela dari pihak-pihak yang memenuhi syarat;
3. Anggaran dasar yang berisi tujuan, struktur dan cara-cara bertindak;
4. Badan perwakilan, konsultatif dan perundingan yang bersifat luas;
5. Sekretariat permanen untuk melaksanakan fungsi administratif, penelitian dan informasi yang berkesinambungan.

Sama hal sebagai subjek hukum internasional, sama seperti Negara, tidak semua Negara dapat menjadi subjek hukum internasional. Demikian juga dengan organisasi internasional. Tidak semua organiasi internasional dapat menjadi subjek hukum internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu organisasi internasional haruslah memenuhi pesyaratan tertentu, yaitu[[8]](#footnote-9)

1. Harus dapat dibuktikan bahwa organiasi internasional tersebut mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang dapat dilihat dari perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya organisasi tersebut;
2. Harus dilihat perkembangan organisasi tersebut dalam masyarakat internasional;
3. Bentuk atau susunan organisasi internasional tersebut apakah memiliki secretariat jenderal dan lain-lain;
4. Organisasi internasional tersebut tidak boleh bertentangan dengan Piagam PBB.

Setelah melihat uraian tentang ciri-ciri dari organiasi internasional diatas, maka dapat dikatakan bahwa ICPO adalah salah satu organisasi internasional. Kedudukan ICPO sebagai organisasi internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. ICPO merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB dengan 190 negara anggota. Sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan oleh Leroy Bennet, maka ICPO adalah organisasi internasional yang bersifat permanen, dibentuk oleh Negara-negara secara sukarela yang memiliki anggaran dasar atau konstitusi yang memuat mengenai tujuan dan struktur organisasi tersebut. ICPO juga memiliki badan perwakilan dan sekretariat permanen yang melaksanakan fungsi administratif, penelitian dan informasi yang berkesinambungan.

ICPO adalah salah satu organisasi internasional. Kedudukan ICPOsebagai organisasi internasional telah diakui oleh masyarakat internasional.Interpol merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB dengan190 negara anggota. Sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan oleh LeroyBennet, maka Interpol adalah organisasi internasional yang bersifat permanen,dibentuk oleh negara-negara secara sukarela yang memiliki anggaran dasar ataukonstitusi yang memuat mengenai tujuan dan struktur organisasi tersebut.

ICPO juga memiliki badan perwakilan dan sekretariat permanen yang melaksanakan fungsi administratif , penelitian dan informasi yang berkesinambungan. Kekuasaan tertinggi dalam organisasi ICPO terletak pada Majelis Umum dan Komite Eksekutif, organ ini memberikan pertimbangan dan mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dan melaksanakanpengawasan. Selain itu juga mengadakan pertemuan secara berkala.

Departemen-departemen terdapat pada Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan-keputusan dan rekomendasi yang telah disahkan oleh organ tertinggi tersebut serta mempunyai hubungan yang erat dengan masing-masing NCB dari negara anggota dalam rangka melaksanakan kerjasama kepolisian. NCB merupakan badan nasional yang bertanggung jawab sebagai penghubung antara negara anggota dan Sekretariat Jenderal. Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar, maka struktur organisasi Interpol adalah sebagai berikut:

1. Majelis Umum *(General Assembly)*

Majelis Umum terdiri dari delegasi-delegasi yang ditunjuk oleh pemerintah Negara-negara anggota. Majelis umum adalah badan tertinggi dari Interpol yang mengambil keputusan-keputusan utama seperti kebijaksanaan umum, sumber daya yang diperlukan untuk kerjasamainternasional, metode kerja, keuangan dan program kegiatan. Majelis umum juga memilih pejabat-pejabat organisasi. Secara Umum mengambil keputusan melalui mayoritas sederhana dalam bentuk rekomendasi atau resolusi. Setiap Negara anggota memiliki satu suara. Untuk lebih memahami fungsi dari Majelis Umum, maka dapat di lihat dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ICPO - Interpol:

* 1. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam konstitusi;
  2. Untuk menentukan prinsip-prinsip dan langkah-langkah umum yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Anggaran Dasar;
  3. Untuk memeriksa dan menyetujui program umum kegiatan yang disiapkan oleh Sekretariat Jendral untuk tahun mendatang;
  4. Untuk menentukan peraturan lain yang dianggap perlu;
  5. Untuk memilih pejabat dalam melaksanakan tujuan seperti yang disebutkan dalam konstitusi;
  6. Untuk mengambil keputusan dan membuat rekomendasi kepada Negara-negara anggota tentang hal-hal yang merupakan fungsi dari organisasi.
  7. Untuk memeriksa dan menyetujui setiap perjanjian yang dibuat dengan organisasi lain.

1. Komite Eksekutif *(Executive Committee)*

Komite eksekutif memiliki 13 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum dari para delegasi Negara-negara anggota. Presiden dari organiasi dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Ia memimpin Majelis Umum dan sidang Komite Eksekutif, menjamin pelaksanaan keputusan yang telah diambil oleh organiasi dan melaksanakan hubungan yang erat dengan Sekretariat Jenderal. 3 orang wakil presiden dan 9 anggota luar biasa, yang dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Kedua belas anggota Komite Eksekutif tersebut dipilih berdasarkan keseimbangan geografi dan harus dari Negara yang berbeda-beda. Komite Eksekutif mengadakan pertemuan 3 kali setahun untuk menjamin pelaksanaan keputusan organisasi, menyusun agenda sidang umum, menyetujui program kegiatan dan rencana anggaran sebelum diajukan kepada Majelis Umum dan mengadakan pengawasan terhadap manajemen Sekretariat Jendral.

1. Sekretariat Jenderal *( General Secretariat )*

Sekretariat Jenderal adalah badan administratif dan teknik yang bersifat tetap dan melalui badan-badan inilah kegiatan Interpol dilaksanakan. Badan ini melaksanakan keputusan yang diambil dalam sidang umum dan Komite Eksekutif melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh sekretaris jenderal dan dibantu oleh personil bidang teknik dan administratif, yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan organisasi. Sekretariat Jenderal terdiri dari Kantor Eksekutif dan 4 bagian yang masing-masing bertanggung jawab terhadap tugas yang spesifik.

* 1. Kantor Eksekutif Sekretariat Jenderal

Merupakan unit bantuan teknik dan administratif yang membantu sekretaris jenderal dalam melaksanakan tugasnya.

## Divisi I ( Administrasi Umum)

Divisi ini bertanggung jawab terhadap pembukuan keuangan organisasi, memimpin staf, menyiapkan perlengkapan dan pelayanan umum serta menyiapkan Sidang Umum dan pertemuan-pertemuan lain yang diselenggarakan Interpol.

* 1. Divisi II (Divisi Polisi)

Divisi ini bertanggung jawab terhadap pusat informasi polisi dan penanganan kasus-kasus kejahatan internasional. Divisi ini juga mengatur proses komputerisasi informasi dan sistem arsip elektronik dan menjamin bahwa peraturan-peraturan penghapusan internal diterapkan terhadap file-file, draft pencarian internasional (draft international notice) dan ringkasan kasus-kasus kriminal. Divisi II terdiri dari 4 sub divisi, yaitu :

1. Sub Divisi 1, yaitu menangani kejahatan umum (kejahatan terhadap orang dan harta benda, kejahatan terorganisir, terorisme).
2. Sub Divisi 2, menangani kejahatan ekonomi dan keuangan (penipuan, pemalsuan uang).
3. Sub Divisi 3, menangani kejahatan peredaran gelap narkotika.
4. Sub Divisi 4, menangani intelijen kriminal.
   1. Divisi III ( Divisi Pelatihan dan Pendidikan)

Divisi ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menerbitkan statistik kejahatan, menulis laporan kerja, menerbitkan majalah polisi reserse internasional, mewakili Interpol dalam konferensi-konferensi internasional, serta melakukan penelitian dan analisa terhadap prosedur yang digunakan oleh kepolisian negara anggotanya.

* 1. Divisi IV ( Divisi Bantuan Teknik)

Divisi bertanggung jawab untuk mempelajari, mengembangkan dan menerapkan teknologi komputer dan telekomunikasi yang penting bagi kerjasama organisasi.

1. Biro Pusat Nasional *(National Central Bureau )*

Pengalaman memperlihatkan bahwa ada 3 faktor utama yang cenderung menghambat kerjasama internasional. Hambatan utama adalah perbedaan struktur kepolisian, yang sering mempersulit Negara lain untuk mengetahui departemen manakah yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai suatu kasus. Kedua adanya perbedaan bahasa yang digunakan oleh tiap-tiap Negara. Hambatan yang ketiga adalah system-sistem resmi prosedur yang beraneka ragam.

Dalam usaha memecahkan masalah-masalah ini diputuskan bahwa pemerintah dari tiap-tiap Negara anggota harus mengangkat suatu lembaga kepolisian permanen untuk bertindak sebagai NCB-Interpol untuk melaksanakan kerjasama internasional. Pengangkatan NCB di setiap Negara anggota ditentukan dalam konstutitusi ICPO yang terdapat pada Pasal 31-33. Tugas utama dari NCB adalah menjamin pertukaran informasi secara internasional dalam rangka pencegahan dan penyidikan kejahatan. Dalam banyak kasus, lembaga yang dipilih adalah lembaga tingkat tinggi dengan kekuasaan luas yang mampu menjawab setiap permintaan dari Sekjen atau dari NCB lain. Staf NCB adalah anggota polisi dari masing-masing Negara atau pegawai pemerintah yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang Negara yang bersangkutan. Kegiatan – kegiatan NCB dapat dirinci sebagai berikut:

* 1. Mengumpulkan dokumen dan intelijen criminal yang memiliki hubungan langsung dengan kerjasama kepolisian internasional dari sumber-sumber Negara mereka dan mengedarkannya kepada Sekjen dan NCB lainnya;
  2. Menjamin bahwa tindakan-tindakan ataupun operasi-operasi yang diminta oleh NCB Negara lain dijalankan di Negara tersebut;
  3. Menerima permintaan-permintaan informasi, pengecakan dan lain-lain dari NCB Negara lain serta menjawab permintaan-permintaan tersebut;
  4. Mengirimkan permintaan kerjasama internasional atas keputusan pengadilan atau atas permintaan kepolisian Negara yang bersangkutan kepada NCB Negara lainnya;
  5. Kepala-kepala NCB menghadiri Sidang Umum Interpol sebagai delegasi dari negaranya dan menjamin bahwa keputusan-keputusan siding dijalankan di negaranya.

1. Penasehat *(Advisers )*

Untuk membantu kasus-kasus khusus, Interpol dapat berkonsultasi dengan para penasehat yang diangkat oleh Komite Eksekutif. Para penasehat ini bertugas selama 3 tahun dan merupakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing – masing yang dapat berguna bagi kepentingan organisasi.

1. Komisi Pengawasan Data-data Interpol *(The Commission for the Control of INTERPOL’s Files ).*

Komisi ini merupakan badan yang independen yang bertugas untuk:

* 1. Memastikan bahwa pengambilan informasi pribadi oleh Interpol sesuai dengan ketentuan dari organisasi;
  2. Memberikan nasehat kepada Interpol atas setiap kegiatan atau operasi, seperangkat aturan atau hal lain yang melibatkan pengolahan data-data pribadi;
  3. Memproses permintaan atas indormasi yang terdapat dalam data Interpol.

## NCB *(National Central Bureu)* Indonesia

### 1. Sejarah Terbentuknya NCB *(National Central Bureau)* Indonesia

Di jantung dari setiap negara anggota INTERPOL adalah Nasional Pusat Biro (NCB), menghubungkan POLRI dengan jaringan global kami. Itu biasanya Divisi Dinas instansi atau penyelidikan polisi nasional dan berfungsi sebagai titik kontak untuk semua INTERPOL kegiatan di lapangan. Dikelola oleh aparat kepolisian yang terlatih, NCBs adalah sumber dari INTERPOL, berkontribusi ke database kami pidana dan bekerjasama bersama-sama pada lintas-perbatasan penyelidikan, operasi dan penangkapan.

Mengingat sifat lintas-perbatasan kejahatan terorganisir, NCBs bekerja sama semakin secara regional. Di seluruh wilayah di dunia, kita melihat negara-negara anggota kami menggabungkan sumber daya dan keahlian dalam sukses intervensi terhadap daerah-daerah kejahatan yang mempengaruhi mereka yang paling-dari mengatasi palsu dan bajakan barang di Amerika Selatan, untuk ilegal Sepakbola perjudian di Asia dan perdagangan Gading di Afrika.

Dalam dekade terakhir, NCBs telah menjadi lebih aktif dalam membentuk INTERPOL kegiatan dan rencana. Kepala NCB konferensi, dimulai pada tahun 2005, menyediakan sebuah forum yang unik untuk membangun hubungan, berbagi informasi dan bekerja sama untuk menemukan bersama solusi terhadap tantangan-tantangan bersama.

Secara yuridis pembentukan **National Central Bureau (NCB)** di suatu negara didasarkan pada pasal 22 Konstitusi ICPO-lnterpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol.

Pada tahun 1952 Pemerintah Indonesia mengirim 2 orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-lnterpol ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-lnterpol. Pada periode 1952-1954 ini, Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia. Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB Indonesia dilaksanakaan oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia. Baru pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-lnterpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara untuk menindaklanjuti Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut.

Berdasarkan Lampiran "J" Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-lnterpol Indonesia, tugas Set NCB-lnterpol Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerjasama/ koordinasi melalui wadah ICPO-lnterpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnational juga menyelenggarakan kerjasama internasional/ antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan "Peace keeping operation" di bawah bendera PBB.

Pengalaman memperlihatkan bahwa ada 3 faktor utama yang cenderung menghambat kerjasama internasional. Hambatan utama adalah perbedaan struktur kepolisian, yang sering mempersulit negara lain untuk mengetahui departemen manakah yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai suatu kasus. Kedua, adanya perbedaan bahasa yang digunakan oleh tiap-tiap negara. Hambatan yang ketiga adalah sistem-sistem resmi prosedur yang beraneka ragam.

Dalam usaha memecahkan masalah-masalah ini diputuskan bahwa pemerintah dari tiap-tiap negara anggota harus mengangkat suatu lembaga kepolisian permanen untuk bertindak sebagai NCB Interpol untuk melaksanakan kerjasama internasional. Pengangkatan NCB di setiap negara anggota ditentukan dalam konstitusi ICPO-Interpol yang terdapat pada Pasal 31-33.. Tugas utama dari NCB adalah menjamin pertukaran informasi secara internasional dalam rangka pencegahan dan penyidikan kejahatan. Dalam banyak kasus, lembaga yang dipilih adalah lembaga tingkat tinggi dengan kekuasaan luas yang mampu menjawab setiap permintaan dari Sekjen atau dari NCB lain. Staf NCB adalah anggota polisi dari masing-masing negara atau pegawai pemerintah yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang negara yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan NCB dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dokumen dan intelijen kriminal yang memiliki hubungan langsung dengan kerjasama kepolisian internasional dari sumber-sumber negara mereka dan mengedarkannya kepada Sekjen dan NCB lainnya
2. Menjamin bahwa tindakan-tindakan ataupun operasi-operasi yang diminta oleh NCB negara lain dijalankan di negara tersebut. 55 Pasal 31-32 Interpol Constitution.
3. Menerima permintaan-permintaan informasi, pengecekan dan lain-lain dari NCB negara lain serta menjawab permintaan-permintaan tersebut.
4. Mengirimkan permintaan kerjasama internasional atas keputusan pengadilan atau atas permintaan kepolisian negara yang bersangkutan kepada NCB negara lainnya.
5. Kepala-kepala NCB menghadiri Sidang Umum Interpol sebagai delegasi dari negaranya dan menjamin bahwa keputusan-keputusan sidang dijalankan di negaranya.

*National Central Bureau* (NCB-Interpol) atau bisa disebut sebagai Biro Pusat Nasional adalah lembaga kepolisian permanen untuk melaksanakan kerjasama internasional yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana dalam lintas negara *(transnasional).* Pembentukan NCB (National Central Bureau) didasarkan pada Konstitusi ICPO-Interpol Pasal 32, bahwa setiap negara harus menunjuk instansi yang ada di negara masing-masing sebagai National central Bureau (NCB).

Selain diamanatkan oleh Konstitusi ICPO Interpol keberadaan NCB *(National Central Bureau)* juga dimaksudkan untuk meminimalisasi halangan territorial yang menjadi batasan kekuasaan yuridiksi dan permasalahan lain, seperti permasalahan prosedur dari mekanisme diplomatik dalam mencegah dan memberantas tindak pidana yang terjadi di dunia. NCB *(National Central Bureau)*dibentuk untuk mempermudah faktor yang cenderung dapat menghambat kerjasama internasional.

Terdapat tiga faktor utama yang menghambat kerjasama di dalam memberantas atau menangani kejahatan, diantaranya adalah:

* 1. Perbedaan struktur Kepolisian di masing-masing negara anggota sehingga mempersulit negara anggota lainnya.
  2. Adanya perbedaan bahasa yang dipergunakan oleh masing-masing negara
  3. Adanya perbedaan sistem hukum.

Konsep pembentukan NCB pertama kali diperkenalkan pada sidang Majelis Umum INTERPOL ketiga pada tahun 1926 yang kemudian dimasukkan dalam *ICPO-Interpol Constitution* pada tahun 1956 dan akhirnya *Michael Foormer*, INTERPOL: *Issues in World Crime and International Criminal Justice,Johan Komala Siswoyo*, “Makalah Hukum Pidana Internasional Mengenai INTERPOL”, dipertegas dalam INTERPOL *General Regulation* pada tahun 1965. Dalam Pasal 32 ICPO-Interpol Constitution diatur bahwa NCB-Interpol harus menyelenggarakan hubungan dengan:

* 1. Berbagai instansi yang ada di dalam negeri masing-masing negara anggota.
  2. Instansi yang ditunjuk sebagai NCB di negara anggota lainnya.
  3. Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol.

Tugas utama dari NCB-Interpol adalah menjamin pertukaran informasi secara internasional dalam rangka pencegahan dan penyidikan kejahatan. Dalam hal ini dapat dirinci beberapa kegiatan yang menjadi beban tanggung jawab dari NCB-Interpol, antara lain sebagai berikut:

* 1. Mengumpulkan dokumen dan intelijen kriminal yang memiliki hubungan langsung dengan kerjasama Kepolisian internasional dari sumber-sumber negara mereka dan mengedarkannya kepada Sekjen dan NCB lainnya.
  2. Menjamin bahwa tindakan-tindakan atau operasi-operasi yang diminta oleh NCB negara lain dijalankan di negara tersebut.
  3. Menerima permintaan-permintaan informasi, pengecekan, dan lainlain dari NCB negara lain serta menjawab permintaan-permintaan tersebut.
  4. Mengirimkan permintaan kerjasama internasional atas keputusan pengadilan atau atas permintaan kepolisian negara yang bersangkutan kepada NCB negara lainnya.
  5. Kepala NCB menghadiri Sidang Umum (Majelis Umum) INTERPOL sebagai delegasi dari negaranya dan menjamin bahwa keputusankeputusan sidang dijalankan di negaranya.

Secara lebih teknis, pola tindakan yang dilakukan oleh NCB-Interpol secara garis besar dapat dibedakan menjadi:

* 1. Mengirimkan kepada Sekretariat Jenderal semua keterangan yang bersifat internasional yang dimiliki oleh masing-masing NCB. Keterangan ini kemudian dipergunakan ICPO-Interpol menyusun statistik kejahatan umum, memungkinkan untuk melakukan pengawasan atas orang-orang yang berbahaya, dan menambah datadata yang telah dimiliki sebelumnya.
  2. Melakukan pekerjaan kepolisian seperti penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan dan lain-lain di dalam yuridiksi negara masing-masing atas permintaan negara lain. Pekerjaan ini yang paling banyak dilakukan oleh NCB.
  3. Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melaksanakan segala keputusan yang telah dibuat oleh Majelis Umum ICPO-Interpol.

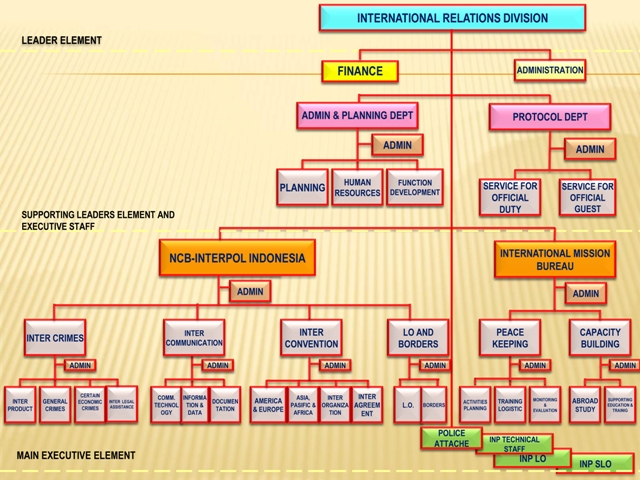
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembentukan NCB di tiap negara anggota tidak menjadi suatu kewajiban akan tetapi setiap negara anggota sedapat mungkin berusaha untuk membentuk NCB dilandasi adanya aturan dalam pasal 33 ICPO-Interpol Constitution yang menyatakan: *“In the case of those countries where the provisions of Article 32 are inapplicable or do not permit of effective centralized co-operation, the General Secretariat shall decide, with these countries, the most suitable alternative menas of co-operation.”*

Pembentukan NCB di tiap negara anggota juga tidak dipaksakan seragam, sehingga masing-masing NCB mempunyai bentuk, susunan dan kedudukan yang berbeda-beda. Kebebasan dalam penentuan format ini dikarenakan prinsip di dalam INTERPOL tidak turut campur dalam masalah internal negara anggota.

Keberagaman bentuk, susunan, serta kedudukan NCB di masingmasing negara secara garis besar dapat dikerucutkan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

* 1. NCB yang dibentuk sebagai lembaga otonom di negara masing-masing dan mempunyai kekuasaan nasional, serta luang lingkup kerjanya khusus pada bidang hubungan dalam lingkup INTERPOL saja. Contohnya NCB Austria, Italia dan Mesir.
  2. NCB yang digolongkan dalam jenis organisasi yang merupakan bagian dari suatu instansi pusat yang telah ada dan merupakan badan khusus akan tetapi tidak otonom. Contohnya NCB Belgia, Jerman, Perancis, Indonesia dan Amerika Serikat. Pada kondisi dimana pelaksanaan Pasal 32 tidak dimungkinkan atau tidak diizinkan adanya kerjasama yang terpusat dan efektif, maka Sekretariat Jenderal bersama dengan negara tersebut harus menentukan cara yang terbaik dalam melaksanakan fungsi NCB.
  3. NCB yang tidak dibentuk dalam suatu instansi khusus tetapi tugastugas NCB diserahkan kepada instansi yang sudah ada. Contohnya NCB Inggris, Kanada, Belanda dan Norwegia.

### Struktur Organisasi NCB Interpol Indonesia



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Divhubinter Polri

<http://www.INTERPOL.go.id/id/tentang-kami/struktur-organisas>

### Fungsi NCB Interpol Indonesia

Kedudukan Divhubinter Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hubungan internasional yang berada di bawah Kapolri. Divhubinter Polri bertugas menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-INTERPOL dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi perdamaian dan kemanusiaan, pengembangan kemampuan sumber daya manusia (*capacity building*) serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Divhubinter Polri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perencanaan dan pembinaan kegiatan administrasi personel dan logistik, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan keuangan, serta pengkajian strategis Divhubinter Polri dalam kerangka kerjasama internasional
2. penyiapan administrasi perjalanan dinas personel Polri ke luar negeri dan pelaksanaan koordinasi protokoler rangkaian kegiatan kunjungan dinas tamu VVIP dan anggota organisasi internasional
3. pelaksanaan kerjasama lintas sektoral dalam rangka penanggulangan  kejahatan Internasional/transnasional,  pertukaran informasi intelijen kriminal, pelayanan umum internasional (*International Public Service*), bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA)
4. pertukaran informasi tentang kejahatan internasional/ transnasional dan informasi lainnya berkaitan dengan *international event* dan kerjasama internasional melalui system jaringan komunikasi INTERPOL, ASEANAPOL,  UNDPKO  (*United Nation Department of Peacekeeping Operations*) dan system teknologi informasi lainnya
5. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dan memfasilitasi personel Polri yang  dipersiapkan untuk melaksanakan tugas misi perdamaian dan kemanusiaan
6. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait khususnya pihak kepolisian Negara akreditasi dan organisasi resmi internasional (PBB, ICPO-INTERPOL) serta organisasi internasional lainnya yang diakui dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana Polri
7. pelaksanaan dan pembinaan Atase Polri, *Senior Liaison Officer* (SLO), Staf Teknis Polri, dan *Liaison Officer* (LO) serta personel Polri yang bertugas di luar negeri, organisasi internasional dan kantor kepolisian di Negara akreditasi
8. pelaksanaan koordinasi dengan Atase Kepolisian negara lain atau LO/penegak hukum negara lain di Indonesia serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di perbatasan
9. pelaksanaan hubungan kerjasama internasional di luar negeri yang meliputi kerjasama di bidang kepolisian, penegakan hukum dan perlindungan WNI di luar negeri

NCB-Interpol, sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi organisasi Interpol mengemban fungsi sebagai koordinator terkait tingkat nasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian NCB-Interpol mempunyai kaitan yang erat dengan semua instansi terkait di dalam negeri, karena dalam prosedur pelaksanaannya tugas NCB-Interpol menyangkut kewenangan berbagai instansi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/203/V/1992 tanggal 9 Mei 1992 dibentuklah Tim Koordinasi Interpol.

|  |
| --- |
| **Sekretaris NCB-Interpol Indonesia** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | alt  Mei 2016 - Sekarang Brigjen Pol Drs. M. Naufal Yahya, M.Sc.(Eng) | | | | | Komisaris Pol. Drs. Soedjono Partodidjojo 1954-1956 Komisaris Pol. Drs. Soedjono Partodidjojo | Komisaris Pol. Drs. K. Soeroso 1956-1964 Komisaris Pol. Drs. K. Soeroso | Brigjen Pol Drs. Wahyudi Wiriodihardjo 1964-1971 Brigjen Pol Drs. Wahyudi Wiriodihardjo | Brigjen Pol Drs. Muslihat Wiradiputra 1971-1974 Brigjen Pol Drs. Muslihat Wiradiputra | | Kol Pol Drs Sidarto Danusubroto, SH 1974-1982 Kol Pol Drs Sidarto Danusubroto, SH | Kol Pol Drs. Karpono 1982-1983 Kol Pol Drs. Karpono | Brigjen Pol Drs. Soeharjono 1982-1983 Brigjen Pol Drs. Soeharjono | Kol Pol Drs. Tony S.K. 1984-1986 Kol Pol Drs. Tony S.K. | | Kol Pol Drs. Daan Sabadan 1986-1987 Kol Pol Drs. Daan Sabadan | Kol Pol Drs. Tony Sugiarto 1987-1990 Kol Pol Drs. Tony Sugiarto | Kol Pol Drs. Ronny Lihawa 1991-1992 Kol Pol Drs. Ronny Lihawa | Brigjen Pol Drs. Suharyono 1992-1994 Brigjen Pol Drs. Suharyono | | Brigjen Pol Drs. Sonny Harsono 1994-1996 Brigjen Pol Drs. Sonny Harsono | Brigjen Pol Drs. Ahwil Luthan 1996-1997 Brigjen Pol Drs. Ahwil Luthan | Brigjen Pol Drs. Wayan Ardjana 1998-Feb 2000 Brigjen Pol Drs. Wayan Ardjana | Brigjen Pol Drs. James D. Sitorus Maret-Mei 2000 Brigjen Pol Drs. James D. Sitorus | | Brigjen Pol Drs. Made M. Pastika Mei-Sept'2000 Brigjen Pol Drs. Made M. Pastika | Brigjen Pol Drs. Dadang Garnida Okt'2000-Okt'2002 Brigjen Pol Drs. Dadang Garnida | Brigjen Pol Drs. Nanan Soekarna November 2002-April 2003 Brigjen Pol Drs. Nanan Soekarna | Brigjen Pol Drs. Sisno Adiwinoto, M.M. Mei 2003-Okt 2006 Brigjen Pol Drs. Sisno Adiwinoto, M.M | | Brigjen Pol.  Drs. Iskandar Hasan  Nov 2006-May 2008 Brigjen Pol Drs. Iskandar Hasan | BrigJen. Pol.Drs. Halba Rubis Nugroho MM  May 2008-Oktober 2010 Irjen Pol. Drs. Halba Rubis Nugroho, MM. | alt  November 2010-2011 Brigjen Pol Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo | alt  Desember 2011 - 2013 Brigjen Pol. Drs. Sugeng Priyanto, SH, MA | | alt  Desember 2013 - Juni 2015 Brigjen Pol. Drs. Setyo Wasisto, SH. | alt  Juni 2015 - Mei 2016 Brigjen Pol. Drs. M. Amhar Azeth, SH. |  |  | |

### Instansi – Instansi yang tergabung dalam NCB Interpol Indonesia

Tim Koordinasi Interpol terdiri dari pejabat Polri dan pejabat Instansi terkait, dengan jabatan dibedakan sebagai “anggota” dan “Liaison Officer” (LO). “Anggota” Tim Koordinasi adalah pejabat setingkat Dirjen atau eselon II, sedangkan “LO” adalah pejabat setingkat eselon III.

Instansi yang menjadi Tim Koordinasi Interpol adalah sebagai berikut:

1. POLRI
2. Bank Indonesia
3. Kementerian  Hukum dan HAM
4. Kejaksaan Agung
5. Kementerian Luar Negeri
6. Kementerian Industri dan Perdagangan
7. Kementerian Perhubungan
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
10. Kementerian Keuangan
11. Kementerian Komunikasi dan Informasi
12. Kementerian  Kelautan dan Perikanan
13. Kementerian Neg Pemberdayaan Perempuan
14. Kementerian  Pariwisata dan kreatifitas Industri Keil
15. Badan Intelijen Nasional
16. Badan POM
17. Peruri
18. Botasupal
19. PPATK
20. BNN

## Landasan Dasar Hukum

### Peran Hukum Pidana Internasional Mengatasi Kejahatan Transnasional

#### Pengertian Hukum Pidana Internasional

Hukum Pidana Internasional *“International Criminal Law”* adalah cabang ilmu hukum baru yang memiliki aspek hukum (pidana) nasional, dan aspek hukum internasional, kedua aspek hukum tersebut bersifat komplementer satu sama lain.

Menurut George Sehwarzenberger, memberikan 5 (lima) pengertian tentang hukum pidana internasional sebagai berikut:

* + 1. Hukum pidana internasional dalam pengertian: ruang lingkup teritorial hukum pidana nasional.
    2. Hukum pidana internasional dalam pengertian: adanya aspek internasional yang ditentukan sebagai ketentuan pada hukum pidana nasional.
    3. Hukum pidana internasional dalam pengertian : adanya kewenangan internasional yang terdapat didalam hukum pidana nasional.
    4. Hukum pidana internasional dalam pengertian: hukum pidana          nasional yang diakui sebagai hukum dalam kehidupan bangsa-bangsa yang beradab.
    5. Hukum pidana internasional dalam pengertian : materi-materi hukum yang tercantum pada hukum pidana internasional tersebut.[[9]](#footnote-10)

Dalam konseptual hukum pidana internasional  kejahatan yang terjadi dalam lingkup internasional maupun dalan nasional (Indonesia) perlu adanya payung hukum yang memuat tentang syarat materiil dan formil yang digunakan pada peradilan dan pengadilan yang dilaksanakan dalam penerapan hukum pidana internasional melalui subyek maupun obyek hukum tersebut, maka dasar sumber hukum pidana internasional menyebutkan yang bersumber dengan klasifikasi sebagai berikut yaitu sumber utama dan sumber skunder dimana yang dimaksud adalah : [[10]](#footnote-11)

1.      Perjanjian internasional.

2.      Kebiasaan internasional (*International Custom*).

3.      Prinsip – prinsip hukum umum (*General Principles of Law*).

4.      Keputusan  pengadilan dan pendapat para penulis terkenal.

5.      Keputusan dalam sengketa antar negara.

Hukum Pidana Internasional merupakan perpaduan antar dua disiplin hukum yang berbeda yaitu aspek pidana dari hukum internasional dan aspek internasional dalam hukum pidana. Hukum Pidana Internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya. International Criminal Law : *“the law which determines what national criminal law will apply to offence actually committed if they contain an international element.”*

Peranan hukum pidana internasional dalam melakukan kajian teoritik dan praktis pemberantasan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. Kemampuan hukum pidana internasional secara implisit telah teruji di dalam berbagai perundingan pembahasan perjanjian bilateral maupun multilateral  antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain.

**Pengertian Transnational Crime**

Menurut Indonesian *Transnational Crime Centre* (TNCC), kata lintas negara tidak hanya diartikan sebagai makna dari internasional atau yang melewati batas negara saja, namun lebih dari itu sifat kejahatannya yang melibatkan lintas perbatasan sebagai bagian penting dari kegiatan kejahatan mereka. Selain itu kejahatan lintas negara juga termasuk kejahatan yang terjadi di satu negara, namun akibatnya sangat berpengaruh terhadap negara lain.[[11]](#footnote-12)

Menurut Pries dalam M. Irvan Olii, perbedaan makna antara internasional dan transnasional adalah bahwa transnasional semakin mengedepankan kuantitas, kualitas, praktek, jaringan, dan hubungan-hubungan lain yang menyangkut lintas batas negara. Transnasional dapat dikatakan sebagai bentuk dari internasional.[[12]](#footnote-13)

Dengan kata lain, menurut M. Siregar , kejahatan lintas negara merupakan perluasan dan pengembangan dari kajahatan internasional yang hanya dikenal dalam bentuk konflik bersenjata antar subyek hukum internasional. Sehingga elemen-elemen utama yang dimiliki kejahatan lintas negara lebih mengarah pada tiga hal, yaitu:

* 1. *Conduct affecting more than one state* atau mempengaruhi lebih dari satu negara
  2. *Conduct including or affecting citizen of more than one state* atau termasuk di dalamnya atau mempengaruhi penduduk pada lebih dari satu negara
  3. *Means and method tranced national boundaries* atau maksud dan metodenya melampaui batas nasional.[[13]](#footnote-14)

Sehingga menurut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* tahun 2000, kejahatan dapat dikatakan lintas negara atau transnasional apabila:

* + 1. Dilakukan di lebih dari satu negara
    2. Persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di negara lain
    3. Melibatkan kelompok kejahatan terorganisir, di mana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara
    4. Berdampak serius bagi negara lain

Aspek terbaru yang mengkarakteristikkan kejahatan lintas negara adalah jaringan hubungan, kontak, dan relasi yang terbentuk di antara para pelaku di berbagai belahan dunia.[[14]](#footnote-15) Secara garis besar PBB pada tahun 1990 menyatakan bahwa transnational crime adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara, yang meliputi pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian hak intelektual, kejahatan lingkungan, penyelundupan senjata api, pembajakan pesawat terbang, bajak laut, perdagangan orang, perdagangan tubuh manusia, kejahatan perbankan, korupsi, dan penggelapan uang negara.[[15]](#footnote-16)

### Peran hukum pidana internasional mengatasi kejahatan transnasional

Dalam dunia internasional yang merupakan yang merupakan bagian dari perserikatan dari bangsa–bangsa, perlu adanya suatu aturan yang mengikat guna memberikan kepastian dan dasar oleh sutau negara dalam melakukan hubungah baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam segi hukum pidana perlu adanya kepastian hukum yang harus dilaksanakan dan di patuhi bagi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Salah satunya Kejadian bom yang terjadi di Amerika, Indonesia dan negara lain di dunia merupakan kejahatan internasional dimana dalam penegakkan hukum nya dapat menggunakan asas hukum pidana international oleh Hugo Grotius sebagai berikut “ Asas  au  dedere  au  punere ” yaitu terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat (locus delicti) terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut, yang dimaksud dalam asas tersebut adalah Pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat (locus delicti) terjadi dalam batas teritorial negara. Pelaku kejahatan terorisme Di Indonesia sudah dijerat dengan Undang-undang Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003).

UNCATOC atau yang sering disebut juga dengan sebutan konvensi Palermo, karena ditandatangani di Palermo, Itali tahun 2000, merupakan salah satu instrument terpenting dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional.

Indonesia telah meratifikasi instrument ini melalui UU No. 5 Tahun 2009 tentang UNCATOC. Konvensi ini bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam rangka mencegah dan melawan secara efektif kejahatan transnasional terorganisir. Kerja sama negara-negara dalam upaya mengatasi masalah kejahatan transnasional terorganisir ini dapat dilakukan pada tahapan penangkapan, penahanan ekstradisi, bantuan timbal balik hukum dan *transfer of sentenced person.*UNCATOC dapat dikatakan sebagai hasil elaborasi instrument-instrumen hukum yang telah ada sebelumnya yang mengatur kejahatan transnasional seperti korupsi, terorisme, people smuugling, human trafficking, perdagangan narkoba, serta perdagangan senjata secara illegal. [[16]](#footnote-17)

Apabila dilihat dalam praktek contohnya dalam proses penegakkan hukum teroris Di Indonesia masih menerapkan hukum pidana nasional diatas, padahal tindak pidana teroris yang terjadi adalah suatu kejahatan trans-nasional. Seharusnya aparat penegak hukum juga menerapkan hukum pidana internasional (Convention for the prevention and punishment of terrorism Di Genewa 1937, International convention for suppresion of terorism bombing 1998, dan International convention for thesuppresion of the financing of terorism 1999) untuk dapat melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyandang dana teroris, jaringan organisasi, otak intelektual dan pendukung logistik yang mana mereka berasal dari warga negara asing diluar yurisdiksi Indonesia.[[17]](#footnote-18)

Dalam hukum pidana internasional, unsur substansinya menggunakan undang-undang yang berlaku yaitu hukum nasional serta proseduralnya dapat dilaksanakan oleh suatu negara yang melaksankan hukum tersebut maupun negara yang meminta. Asas  “au  dedere  au  punere ” oleh Hugo Grotius yaitu terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat (locus delicti) terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan kepada negara peminta yang dimiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut.

Kejahatan trans-nasional adalah kejahatan lintas batas nasional yang dimaksud dimana  kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari suatu negara atau antar negara yang merugikan baik secara materiil maupun nyawa orang yang berdampak atau berpengaruh terhadap antar negara maupun dunia internasional, seperti dengan adanya kejadian pengeboman yang dilakukan oleh teroris merupakan kejahatan trans-nasional, dimana kejahatan tersebut pelaku yang berasal bukan dari satu negara saja dan kerugian yang ditimbulkan baik jiwa orang asing dan Indonesia maupun materiil/aset negara lain, maka kejahatan teroris merupakan kejahatan trans- nasional. Kejahatan yang dilakukan oleh teroris tersebut tetap secara proses hukum dan substansi hukum mengunakan hukum nasional walaupun dalam pelaksanaan prosedural dibantu oleh pihak negara lain.

Kelompok-kelompok kejahatan terorganisir umumnya memiliki markas di negara-negara yang lemah sistem penegakan hukumnya sebagai safeheavens untuk pelaksanaan operasi transnasionalnya. Internet tidak hanya digunakan untuk membobol data nasabah tetapi juga digunakan untuk kejahatan transnasional yang lain seperti pencucian yang, narkoba, bahkan terorisme.[[18]](#footnote-19)

Bagi Indonesia, kejahatan transnasional sudah merupakan ancaman yang besar, mengingat saat ini Indonesia ukan sekedar menjadi wilayah transit kejahatan-kejahatan tersebut tetapi telah menjadi wilayah sasaran. Kerja sama lintas batas dengan berbagai instansi dalam negeri dalam berbagai wujud bentuk kerja sama termasuk di dalamnya pembuatan-pembuatan harmonisasi instrument hukum nasional sangatlah diperlukan.[[19]](#footnote-20)

### *International Criminal Police Organization* (ICPO Iinterpol) Dalam Hukum Internasional

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional yang disebut sebagai kejahatan transnasional (transnational crime). Istilah transnasional sendiri dalam kepustakaan hukum internasional pertama kali diperkenalkan oleh **Phillip C. Jessup**. Jessup menjelaskan bahwa selain istilah hukum internasional atau international law, digunakan pula istilah hukum transnasional atau transnasional law yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas territorial suatu Negara.[[20]](#footnote-21)

Kejahatan transnasional merupakan bagian dari kejahatan internasional yang mempunyai dampak melewati batas territorial suatu Negara, kejahatan transnasional dapat dilakukan secara individual dan/atau kelompok atau terorganisir. Kejahatan transnasional yang terorganisir diatur dalam Convention of Transnational Organized Crime 2000 atau yang biasa disebut dengan Konvensi Palermo 2000.

Kejahatan Internasional dapat diartikan secara luas sebagai keseluruhan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Batasan definisi dan klasifikasi dari kejahatan internasional menunjukkan adanya unsur lintas batas atau menyangkut kepentingan bukan hanya domestik dari suatu negara, tetapi juga kepentingan negara lain. Definisi yang lebih luas dari kejahatan internasional juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang memang diperangi oleh seluruh umat manusia yaitu kejahatan seperti, perang, penjajahan dan perbudakan.

Kejahatan Internasional seperti ini dapat dikategorikan dalam hukum humaniter yang membahas secara khusus mengenai hukum perang internasional. Ada pula kejahatan internasional perkembangan dari bentuk kejahatan yang dikenal secara domestik yang berubah sifatnya dan berkembang menjadi ancaman masyarakat internasional secara umum seperti perdagangan orang dan peredaran obat bius. [[21]](#footnote-22)

I Wayan Parthiana dalam bukunya, Hukum Pidana Internasional merumuskan definisi dan klasifikasi Kejahatan Internasional sebagai berikut[[22]](#footnote-23) :

Pertama; Dimensi-dimensi internasional dari hukum pidana nasional, bisa saja pada hukum pidana nasional itu yang diberlakukan keluar batas-batas wilayah Negara yang bersangkutan; Misalnya pemberlakuan hukum pidana nasional terhadap kejahatan yang terjadi di dalam wilayah Negara tetapi menimbulkan korban yang berada di luar wilayah Negara, seperti korban-korban di laut lepas atau di ruang udara di atas laut lepas.

Kedua; Dimensi-dimensi internasional dari kejahatannya adalah, kejahatan dengan segala akibatnya itu tidak terjadi semata-mata di dalam batas wilayah Negara yang bersangkutan, tetapi juga di wilayah Negara lain, sehingga tersangkut kepentingan atau hukum nasional Negara atau Negara-negara lainnya, misalnya kejahatan yang dilakukan di suatu Negara ternyata menimbulkan korban di pelbagai Negara. Sebagai contoh adalah kejahatan pemalsuan mata uang yang dilakukan di wilayah suaatu Negara dan kemudian diedarkan ke Negara-negara yang mata uangnya dipalsukan.

Ketiga; Bahkan dimensi internasionalnya itu bisa terjadi pada subyek hukumnya, baik subyek hukum sebagai si pelaku maupun korban dari kejahatan tersebut. Misalnya , beberapa orang yang berada di wilayah Negara yang berbedabeda, bekerjasama melakukan kejahatan yang menimbukan korban juga di pelbagai Negara. Dalam hal ini, tersangkut kepentingan lebih dari satu Negara dengan hukum nasionalnya msing-masing.

Keempat; Kombinasi dari pertama, kedua, dan ketiga. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, dapat dijumpai pelbagai jenis kejahatan yang boleh jadi menampakkan semua aspek seperti dipaparkan di atas.

Prof. Dr. H. R. Abdussalam dalam bukunya Hukum Pidana Internasional memberikan juga batasan definisi dari kejahatan internasional yang juga berbeda aspek prosedural penegakan hukumnya menjadi[[23]](#footnote-24) :

* 1. Tindak pidana internasional yang merupakan pelanggarah hukum hak asasi manusia dalam keadaan damai yang dikenal dengan islilah trasnational crimes. Elemen - elemen dari *transnational crime*, antara lain[[24]](#footnote-25) :
  2. *Conduct affecting more than one state*
  3. *Conduct including or affecting citizen of more than one state*
  4. *Means and methods tranced national boundaries*
  5. Tindak pidana internasional yang merupakan pelanggaran hukum hak asasi manusia dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional disebut juga pelanggaran hukum humaniter internasional (pelanggaran terhadap konvensi – konvensi dan protokol)

Dari definisi Kejahatan Internasional yang dikemukakan oleh **I Wayan Parthiana dan Abdussalam** tersebut, dapat dilihat bahwa makna kejahatan internasional mengalami perluasan. Kejahatan Internasional yang pada awalnya dikenal hanya dalam bentuk konflik bersenjata antar subjek hukum internasional mulai berkembang dan akhirnya dikenal istilah transnasional crime atau kejahatan lintas batas negara. Karena modus serta akibat dari kejahatan-kejahatan telah melampaui lebih dari satu wilayah Negara, maka dari itu dibentuklah suatu organisasi antar kepolisian antar Negara yang disebut dengan *International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol).

ICPO merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang penanggulangan kejahatan internasional. ICPO sendiri lebih dikenal dengan nama Interpol bukan merupakan singkatan dari International Police karena memang tidak ada yang namanya Polisi Internasional atau Polisi Dunia dalam hukum internasional sejauh ini.

### ICPO-Interpol Bukanlah Polisi Internasional atau Polisi Dunia

Sebagai titik tolak, perlu diteliti apakah ICPO-Interpol itu adalah “Polisi Internasional” atau “Polisi Dunia”, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka di tinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

a. Arti istilah “Polisi”

Sebagaimana diketahui arti istilah polisi harus dibedakan antara “polisi sebagai fungsi” dan “polisi sebagai organ”. Polisi sebagai tugas pada pokoknya menunjuk pada tugas untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat dipelihara dan dijamin keamanan dan keterlibatan dalam masyarakat tersebut.

Sedangkan polisi sebagai organ, menunjuk pada organ di dalam masyarakat atau Negara yang mempunyai tugas sebagaimana disebut di atas, yang di dalam hal-hal tertentu diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. Dari gambaran tersebut, kiranya jelas tidak dapat dipisahkan antara polisi sebagai tugas maupun sebagai organ dengan masyarakat atau dengan perkataan lain tidak mungkin adanya masyarakat tanpa polisi.

b. Karakteristik masyarakat internasional.

Berdasarkan hukum internasional terdapat 2 (dua) teori tentang masyarakat internasional, yakni :[[25]](#footnote-26)

1) Teori Universalisme, bahwa masyarakat internasional adalah suatu masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang mendiami permukaan bumi, karena itu sebagai umaat manusia merupakan satu kesatuan. Teori ini menitikberatkan kepada hal-hal yang sama yang memiliki individuindividu dan karenanya menjadi dasar dari ikatan-ikatan yang menghubungkan mereka satu sama lain.

2) Karena diatas individu-individu banyak organisasi dimana setiap individu pasti menjadi anggotanya dan dalam perkembangan modern ini, organisasi yang paling tinggi tingkatannya adalah Negara, maka timbul teori yang kedua yang menyatakan bahwa masyarakat internasional adalah masyarakat yang terdiri dari Negara-negara. Dalam hubungan dengan teori-teori tersebut di atas yang pada umumnya merupakan pendapat para sarjana hukum internasional mengenai karakteristik masyarakat internasional antara lain dapat ditonjolkan :[[26]](#footnote-27)

a) Bahwa dalam masyarakat internasional tidak ada kekuasaan (politik) yang tertinggi yang dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa terhadap subjek-subjek hukum internasional lainnya.

b) Bahwa dalam masyarakat internasional, Negara-negara melaksanakan kedaulatannya sesuai dengan kepentingan masing-masing.

c) Bahwa dalam masyarakat internasional, masing-masing Negara mempunyai angkatan bersenjata, melaksanakan perang sebagai tindakan hukum terhadap Negara-negara yang dianggap bersalah.

c. Karakteristik Hukum Internasional.

Dapat dikemukanak bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, maka sumber hukum internasional terdiri dari :[[27]](#footnote-28)

1) Perjanjian-perjanjian internasional (international traties).

2) Kebiasaan Internasional. Yang terbukti dari praktek umum yang telah diterima sebagai hukum.

3) Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.

4) Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai Negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan dan kaidah hukum.

## Mekanisme Kerja ICPO Dan NCB Interpol Indonesia

### Mekanisme Kerja ICPO

*Internasional Crime Police Organisation* sebagai suatu Organisasi yang mempunyai peran tugas untuk memberantas jaringan narkotika antara lain:

1. Menerbitkan “*Internasional Notices*yang berisi pencarian pelaku kejahatan, peringatan untuk mengikuti kegiatan seseorang yang dicurigai, informasi-informasi tentang penjahat internasional, mayat tidak dikenal, modus operandi baru,dan jenis kejahatan yang berkembang yang dijelaskan sebagai berikut:
2. *Red Notices ( Wanted Notice)*adalah permintaan pencarian tersangka/ terdakwa atau terpidana yang diduga melarikan diri ke negara lain, dengan maksud agar dilakukan pencarian, penangkapan dan penahanan untuk diekstradisikan.
3. *Blue Notice (Enquiry Notice*) adalah Permintaan pencarian pelaku kejahatan yang diduga melarikan diri ke Negara lain bukan untuk tujuan penangkapan, tetapi untuk dilokalisir dan atau kemungkinan adanya catatan criminal serta jati diri maupun aktifitas lainnya.
4. *Green Notice (Warning Notice)* adalah Informasi yang berisi peringatan kepada Negara-negara lain agar waspada terhadap residivis atau seseorang atau kelompok yang kemungkinan akan melakukan kejahatan di Negara penerima informasi.
5. *Yellow Notice (Missing Person)* adalah Pencarian orang yang diduga hilang atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan diduga hilang, yang kemungkinan pergi atau berada di Negara lain.
6. *Black Notice (Unidentified Body)* adalah Permintaan informasi tentang penemuan mayat yang tidak diketahui identitasnya dan diduga berkebangsaan lain.
7. Menerbitkan “Interpol review” yang berisi informasi-informasi tentang kejahatan dan penyalahgunaannya serta penerapan teknologi dalam tugas-tugas kepolisian.
8. Menyelenggarakan symposium, seminar, training dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional,
9. Komputerisasi data dan informasi kejahatan (sidik jari,identitas pelaku, perusahaan dan organisasi) yang biasa di akses oleh setiap negara naggota
10. Memberikan bantuan teknik di bidang telekomunikasi guna terselenggaranya pertukaran informasi dengan cepat dan aman. [[28]](#footnote-29)

     Secara khusus, Indonesia juga memiliki peran dalam pemberantasan narkoba di Indonesia melaluiNCB-Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari ICPO mempunyai peran khusus dalam menanggulangi kejahatan narkotika di Indonesia namun peran ini tidak terlepas dari peranan secara umum yang telah dijelaskan sebelumnya. Peran khusus ini di pengaruhi oleh keberadaan NCB-Indonesia yang berada di wilayah Indonesia yang menganut system hukum dan peradilan yang berlaku di Indonesia. [[29]](#footnote-30)

     Dalam memberikan informasi baik itu kepada pihak kepolisian atau kepada negara lain NCB-Indonesia mengeluarkan “*Notice*” merupakan salah satu alat untuk melacak keberadaan orang di Luar Negara asalnya, adalah kewajiban negara – negara yang tergabung dalam Interpol untuk menyebar luaskannya,  dan mencari buronan Notice tersebut di dalam negerinya, kemudian menangkap atau minimal memberitahu negara asal pembuat *Notice*.

Dalam hal peran NCB-Indonesia ataupun NCB-Interpol di negara lain harus langsung menanggapi dan menyerahkan daftar Red Notices ini kepihak imigrasi tiap negara dan kepolisian di masing-masing negara. Tolak ukur yang digunakan sebagai efektif atau tidaknya permasalahan ini bisa dikategorikan dalam 3 jenis kelompok yang harus direspons oleh NCB-Indonesia ataupun Interpol lain di negara lain yaitu yang pertama Kategori Urgent (harus di respons secepat mungkin maksimal 24 jam); yang kedua kategori ‘Normal”(harus di respons secepat mungkin dalam waktu 10 hari) ; yang ketiga yaitu kategori “Non-Urgent”(harus di respons secepat mungkin dalam waktu 1 bulan)[[30]](#footnote-31). Oleh karena itu dalam mengajukan permintaan bantuan kepada suatu negara harus diketahui ketentuan yang berlaku di negara yang diminta bantuan.

Berdasarkan penejelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran interpol dalam pemberantasan jaringan peredaran narkotika secara umum ditempuh dengan tiga cara sesuai bentuk kerjasama yaitu:

a.         Jalur Interpol antar NCB. Kerjasama dalam bentuk tukar menukar informasi dan permintaan bantuan penyelidikan pada umumnya dapat dilakukan melalui NCB negara masing-masing. Ada juga negara yang mau memenuhi permintaan bantuan penyidikan, permintaan penangkapan / penahanan dan penyerahan pelaku kejahatan (*handing over)* walaupun permintaan diajukan melalui jalur Interpol.

b.         Jalur Diplomatik. Melalui Perwakilan Negara atau Departemen Luar Negeri negara peminta/ perwakilannya. Sedangkan kerjasama dalam bentuk penyidikan dan ekstradisi pada umumnya kebanyakan negara mesyaratkan permintaan bantuan harus diajukan melalui jalur diplomatic.

c.         Jalur Campuran  yaitu melalui diplomatik dan melalui NCB-Perwakilan Negara/ Liaison Officer/ Deplu-Instansi yang berwenang atau NCB-Liaison Officer negara anggota interpol.

Namun dengan demikian, mekanisme kerjasama bersifat fleksible dan tidak kaku, yang penting negara yang melaksanakan kerjasama untuk yang meminta maupun yang memberi bantuan dalam menyetujui mekanisme yang dilakukan mengenai kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana internasional pada umumnya, beberapa institusi hukum yang disebutkan dalam *United Nations* *Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*seperti ekstradisi (Pasal 16), pemindahan narapidana (Pasal 17), bantuan hukum timbal balik (Pasal 18), penyelidikan bersama (Pasal 19), kerjasama dalam melakukan tehnik-tehnik penyelidikan khusus (Pasal 20), pemindahan proses pidana (Pasal 21) sebenarnya sudah termasuk dalam pengertian ruang lingkup kerjasama penegakan hukum sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 27 UNTOC dan sudah dilakukan oleh Indonesia, terutama oleh Kepolisian RI, baik secara langsung dengan Kepolisian negara-negara sahabat (billateral) ataupun kerjasma melalui *International Criminal Police Organization*. Hanya saja terhadap instrumen hukum yang telah ada diperlukan penyesuaian disana-sini dengan asas-asas dan ketentuan hukum internasional baru yang terkandung dalam UNTOC.

### Mekanisme Kerja NCB Indonesia

Kedudukan NCB-Interpol Indonesia yang merupakan bentuk hubungan kerjasama internasional khususnya dalam hal pemberantasan kejahatan atau tindak pidana internasional berada dibawah wewenang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), sehingga berada di dalam Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada di Jakarta.[[31]](#footnote-32)

Kepala NCB-Interpol Indonesia dijabat oleh Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diemban oleh Kepala Divhubinter Polri. NCB-Interpol Indonesia adalah salah satu Biro yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas NCB-Interpol dalam kerjasama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral.[[32]](#footnote-33)

Kedudukan NCB-Interpol Indonesia merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi ICPO-Interpol di Indonesia untuk menanggulangi kejahatan internasional dan kejahatan transnasional.[[33]](#footnote-34) Tugas utama yang dimiliki oleh NCB-Interpol, yaitu melakukan pemberantasan kejahatan yang terjadi di lintas negara. Kemudian dalam mengembangkan tugas-tugas yang dimilikinya tersebut, NCB-Interpol Indonesia membagi beberapa tugasnya tersebut dalam bentuk divisi atau bagian struktur organisasi NCB-Interpol Indonesia.[[34]](#footnote-35)

NCB-Interpol Indonesia memiliki 4 (empat) bidang bagian untuk mengembangkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

#### Bagian Kejahatan Internasional

Bagian Kejahatan Internasional yang disingkat Bagjatinter bertugas melaksanakan kegiatan kerjasama antar NCB-Interpol dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional dan kejahatan transnasional serta pelayanan umum internasional dalam kaitannya dengan kejahatan termasuk pelaku, buronan dan bantuan hukum internasional serta pencarian orang hilang yang diduga berada diluar negeri.

Bagjatinter juga melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal terhadap suatu pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di perwakilan RI, pesawat dan kapal berbendera RI guna mewujudkan perlindungan, pelayanan terhadap WNI di luar negeri. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bagjatinter menyelenggarakan fungsi:

* 1. Penyiapan produk-produk internasional, misalnya: penyebarluasan DPO (Daftar Pencarian Orang) internasional, modus operandi yang terjadi di negara lain, pembuatan country paper, dan lain-lain.
  2. Penanggulangan kejahatan umum yang terkait dengan negara lain.
  3. Penanggulangan kejahatan ekonomi khusus yang terkait dengan negara lain.
  4. Pemberian bantuan hukum internasional yang terkait Ekstradisi, MLA dan pencarian buronan/penerbitan Notices. Misalnya: penangkapan buronan KPK a.n. Nazaruddin di Kolombia pada tahun 2012 (kasus korupsi), pemulangan Umar Patek tahun 2011 dari Pakistan (kasus terorisme), Pemulangan Nunun Nurbaeti tahun 2012 dari Thailand (Kasus Korupsi) dan lain-lain.[[35]](#footnote-36)

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter) dibantu oleh 4 (empat) subbagian, diantaranya adalah:

a. Subbagian kejahatan umum (subbagjatum) yang bertugas:

1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanggulangan kejahatan umum yang terkait dengan negara lain.

2) Melaksanakan korespondesi melalui sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL.

3) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kewilayahannya terhadap permasalahan baik yang diminta oleh negara sesama anggota NCB-Interpol maupun dari satuan kewilayahan.[[36]](#footnote-37)

b. Subbagian Kejahatan Ekonomi Khusus (subbagjateksus) yang bertugas:

1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanggulangan kejahatan ekonomi khusus yang terkait dengan negara lain.

2) Melaksanakan korespondensi melalui sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL terkait kejahatan ekonomi khusus.

3) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kewilayahan terhadap permasalahan baik yang diminta oleh negara sesama anggota NCB-Interpol maupun dari satuan kewilayahan terkait kejahatan ekonomi khusus.[[37]](#footnote-38)

c. Subbagian Produk Internasional (Subbagprodukinter) yang bertugas:

1) Melaksanakan penyiapan produk-produk internasional, antara lain: pembuatan country paper, penyebarluasan berita actual internasional tentang perompakan, narkotika, dll.

2) Melaksanakan rapat internal Polri dengan kementrian terkait dalam penyiapan kertas posisi delegasi RI.

3) Melaksanakan pengkajian dan memberikan rekomendasi kepada Kabagjatinter. (Ketua Bagian Kejahatan Internasional).[[38]](#footnote-39)

d. Subbagian Bantuan Hukum Internasional (Subbagbankuminter) yang bertugas:

1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Ekstradisi dan MLA.

2) Memfasilitasi penerbitan daftar pencarian orang (red notices).

3) Melakukan pencarian buronan atas permintaan negara sesama anggota NCB-Interpol. Misalnya Adrian Kiki Ariawan (kasus perbankan), Hesam Al Waraq (kasus korupsi), Very Riang Hepat (Kasus Penipuan), Denley Wono (Kasus penipuan) dll.[[39]](#footnote-40)

Tim Koordinasi INTERPOL

Tim Koordinasi INTERPOL merupakan wadah kerjasama yang bersifat non-struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri selaku Kepala NCB-Interpol Indonesia. Tugas dari Tim Koordinasi INTERPOL diantaranya adalah membahas dan melaksanakan setiap permintaan bantuan baik dari NCB negara lain maupun dari dalam negeri khususnya terhadap hal-hal menonjol yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang beraspek internasional.[[40]](#footnote-41)

1. Bagian Komunikasi Internasional

Bagian Komunikasi Internasional atau biasa disingkat Bagkominter, mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kerjasama internasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional dan kejahatan transnasional melalui sarana system jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL serta mengumpulkan informasi dan pengolahan data, publikasi serta dokumentasi kerjasama internasional Polri.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut bagkominter menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pertukaran Informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi lainnya.

b. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jjaringan komunikasi lainnya.

c. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Divhubinter serta kegiatan internasional lainnya.

d. Sebagai National Security Officer (NSO) jaringan I-24/7 INTERPOL di Indonesia.

e. Sebagai fasilitator dalam sharing dan pertukaran informasi internasional pada satuan kerja Polri, seperti: CTNS, SDWAN, G8- 24/7, TNCC (CMIS), NCIC (Pusiknas).[[41]](#footnote-42)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagkominter melakukan peran sebagai regulator, fasilitator dan controller dalam mendukung pelaksanaan tugas Divhubinter Polri terutama dalam teknologi informasi, data dan informasi serta publikasi dan dokumentasi internasional.

Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan oleh subbagian yang berada dalam Bagian Komunikasi Internasional diantaranya adalah:

a. Subbagian Teknologi Komunikasi (Subbagtekkom) yang mempunyai tugas:

1) Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan I-24/7 INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi Internasional lainnya ke fungsi Mabes Polri dan kewilayahannya.

2) Melaksanakan kerjasama dengan instansi penegak hukum terkait dalam pemanfaatan sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL, termasuk wilayah lintas batas (seperti: bandara, pelabuhan dan pos perbatasan).

3) Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan website/webmail, database dan jaringan Local Area Network (LAN) Divhubinter Polri serta TV Monitoring.

4) Pengembangan jaringan Wide Area Network (WAN) mencakup akses dari perwakilan Polri yang berada di luar negeri dan pengembangan Businnes intelligence (BI) Divhubinter Polri.[[42]](#footnote-43)

b. Subbagian Informasi dan Data (Subbaginfodata) yang mempunyai tugas:

1) Membangun dan mengembangkan aplikasi serta melaksanakan pengelolaan database Divhubinter Polri.

2) Melakukan pertukaran informasi melalui sistem jaringan I-24/7 INTERPOL, ASEANAPOL, internet, faksimili dan perangkat komunikasi lain.

3) Melakukan pengumpulan data pengolahan data dalam rangka kerjasama internasional kepolisian dan penegak hukum.

4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisa data kriminal serta sistem pelaporan.

c. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi (Subbagpubdok) yang mempunyai tugas:

1) Melaksanakan kerjasama dalam rangka pengelolaan publikasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama internasional Polri.

2) Menertibkan dan mengedarkan informasi-informasi yang bermanfaat melalui media cetak dan elektronik, termasuk website INTERPOL Indonesia dan portal Divhubinter polri (intranet cloud), serta TV Monitoring.

3) Melaksanakan dokumentasi kegiatan Divhubinter Polri.

4) Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Divhubinter Polri.[[43]](#footnote-44)

#### Bagian Konvensi Internasional (Bagkovinter)

Bagian Konvensi Internasional atau biasa disebut Bagkonvinter mempunyai tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan perjanjian internasional dan penyelenggaraan pertemuan internasional baik dilaksanakan di dalam maupun diluar negeri dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional maupun kejahatan transnasional dan pembangunan kapasitas baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana.[[44]](#footnote-45)

Dalam menjalankan fungsinya, Bagkonvinter menyelenggarakan berbagai kegiatan, diantaranya adalah mengkaji perlunya kerjasama dengan negara lain dan organisasi atau badan internasional, menyiapkan draft naskah perjanjian internasional, melaksanakan pertemuan internasional, regional, bilateral dan multilateral, menyelenggarakan Working Group Meeting guna merumuskan perjanjian dan kerjasama internasional, melaksanakan monitoring kerjasama, serta melakukan analisa dan evaluasi mengenai efektivitas kerjasama yang dilakukan dengan kepolisian/penegak hukum negara lain dan organisasi atau badan internasional.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Bagkonvinter dibantu oleh 4 (empat) Subbag, yaitu:

a. Subbag Amerika dan Eropa (Amerop), yang bertugas:

1) Mengkaji pentingnya kerjasama dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.

2) Melaksanakan monitoring kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.

3) Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas kerjasama dengan negara-negara kawasan Amerika dan Eropa.

4) Menyelenggarakan rapat internal Polri guna membahas kerjasama antara Polri dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.

5) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementrian Luar Negeri RI terkait kerjasama dengan negara-negara dikawasan Amerika dan Eropa.

6) Menyelenggarakan Working Group meeting dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.

7) Menyiapkan materi atau bahan pertemuan bilateral dengan negara kawasan Amerika dan Eropa baik, yang dilaksanakan di Indonesia maupun diluar negeri.[[45]](#footnote-46)

b. Subbag Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) yang bertugas:

1) Mengkaji pentingnya kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

2) Melaksanakan monitoring kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

3) Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas kerjasama dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

4) Menyelenggarakan rapat internal Polri guna membahas kerjasama antara Polri dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

5) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementrian Luar Negeri RI terkait kerjasama dengan negara-negara dikawasan Asia Pasifik dan Afrika.

6) Menyelenggarakan Working Group meeting dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

7) Menyiapkan materi atau bahan pertemuan bilateral dengan negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika, baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun diluar negeri. [[46]](#footnote-47)

c. Subbag Organisasi Internasional (OI), yang bertugas:

1) Mengkaji pentingnya kerjasama dengan organisasi atau badan internasional, dan forum regional.

2) Melaksanakan monitoring kerjasama yang dilakukan dengan organisasi atau badan internasional dan forum regional.

3) Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas kerjasama dengan organisasi atau badan internasional, dan forum regional.

4) Menyelenggarakan rapat internal Polri guna membahas kerjasama antara Polri dengan organisasi atau badan internasional, dan forum regional.[[47]](#footnote-48)

5) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementrian Luar Negeri RI terkait kerjasama dengan organisasi atau badan internasional, dan forum regional.

6) Menyelenggarakan pertemuan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.

7) Menyiapkan materi atau bahan pertemuan dalam forum regional atau internasional baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri.

d. Subbag Perjanjian internasional (PI), yang bertugas:

1) Menyusun naskah perjanjian internasional, antara Polri dengan Kepolisian/Penegak Hukum negara lain atau antara Polri dengan Badan/Organisasi Internasional lainnya.

2) Melaksanakan rapat internal Polri dalam membahas draft awal naskah perjanjian internasional baik initial draft maupun counter draft.

3) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementrian Luar Negeri RI terkait dengan naskah perjanjian internasional.

4) Melaksanakan Working Group Meeting dengan melibatkan berbagai instansi yang berkompeten.

5) Mengirimkan baik initial draft maupun counter draft naskah perjanjian internasional kepada Kepolisian/Penegak Hukum negara lain atau Badan/Organisasi Internasional lainnya.

6) Mengkoordinasikan waktu dan tempat penandatanganan naskah perjanjian internasional.

7) Melaksanakan Analisa dan evaluasi mengenai efektivitas naskah perjanjian internasional yang ada.[[48]](#footnote-49)

#### Bagian Liaison Officer dan Perbatasan

Bagian Liaison Officer dan Perbatasan atau biasa disebut Baglotas bertugas melaksanakan pembinaan teknis Atase Polri/SLO (Senior Liaison Officer) dan Staf Teknis Polri/LO (Liaison Officer) di luar negeri termasuk sumber daya manusia Polri dan sarana prasarana tugas Polri di perbatasan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Baglotas menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

a. Pembinaan Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri/LO.

b. Pembinaan teknis Polri termasuk sumber daya manusia dan sarana prasarana tugas di wilayah perbatasan.

c. Pelaksanaan koordinasi dengan penegak hukum atau LO (Liaison Officer) negara lain di Indonesia.[[49]](#footnote-50)

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bagian Liaison Officer dan Perbatasan (Baglotas) dibantu oleh 2 (dua) subbagian, diantaranya adalah :

a. Subbag LO ( Liaison Officer), yang mempunyai tugas:

1) Membina para Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri/LO.

2) Melaksanakan supervisor para Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri/LO.

3) Melaksanakan rapat koordinasi tahunan Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri/LO.

4) Membangun jaringan dan kerjasama dengan penegak hukum atau LO (Liaison Officer) negara lain yang ditugaskan di Indonesia.

5) Melaksanakan analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri/LO.[[50]](#footnote-51)

b. Subbagtas (Perbatasan), yang mempunyai tugas:

1) Melaksanaan pembinaan teknis Polri termasuk sumber daya manusia dan sarana prasarana tugas di wilayah perbatasan.

2) Melaksanakan supervisor ke wilayah perbatasan.

3) Melaksanakan rapat koordinasi perbatasan secara periodik.

4) Melaksanakan analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Brigadir Polri perbatasan.[[51]](#footnote-52)

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Subbag LO memiliki tugas untuk membina para Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri/LO. Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri merupakan petugas Kepolisian yang melaksanakan tugas dan berkedudukan di luar negeri. Disamping melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional para Atase polri/SLO dan Staf Teknis Polri/LO juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di Negara penugasan, Property (hak milik) dan Policy (kebijakan) NKRI di Luar Negeri. [[52]](#footnote-53)

Sampai saat ini Polri menempatkan 9 (sembilan) Atase Polri/SLO (Bangkok, Canberra, Dili, Kuala Lumpur, Manila, Riyadh, Washington D.C., Den Haag dan Singapura) dan 6 (enam) Staf Teknis Polri/LO (Kuching, Penang, Tawau, Davao City, Hong Kong dan Johor Bahru).

1. Ibid,hal. 2. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid, hal. 3. [↑](#footnote-ref-3)
3. J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 43. [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://www.interpol.int/About-INTERPOL/History> [↑](#footnote-ref-5)
5. Upaya Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional, Mabes Polri,Jakarta, 2006, hal 7 [↑](#footnote-ref-6)
6. Supt. Budiman Parangin-angin, Mutual Legal Assistance (MLA), Majalah Interpol, 2006, hal. 59.. [↑](#footnote-ref-7)
7. <https://www.interpol.int/Member-countries/World> , diakses pada tanggal 25 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-8)
8. Bowett, D.W., Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1991. Hal 5 [↑](#footnote-ref-9)
9. Prof. Dr. H.R. Abdussalam, Sik, SH, MH, Hukum Pidana Internasional 1, Jakarta : Restu Agung, 2006. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid. [↑](#footnote-ref-11)
11. M. Irvan Olii, loc cit [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid [↑](#footnote-ref-13)
13. M. Siregar, 2013, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam Hukum Internasional, diakses dari repository.usu.ac.id pada tanggal 16 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-14)
14. M. Irvan Olii, Op. Cit Hal. 23 [↑](#footnote-ref-15)
15. Indonesian Transnational Crime Centre, diakses dari tncc.go.id pada 16 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-16)
16. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. , Peran Hukum Internasional – Dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016. Hal.287-289 [↑](#footnote-ref-17)
17. Prof. Dr. H.R. Abdussalam, Sik, SH, MH, Hukum Pidana Internasional II, Jakarta : Restu Agung, 2006. [↑](#footnote-ref-18)
18. C.P.F luhulima, “kejahatan Lintas Negara di ASEAN: Ancaman Terhadap Keamanan Regional”, dalam Kerja Sama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, 2001, Dirjen Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri RI. Halaman 197-199 [↑](#footnote-ref-19)
19. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. , Loc. Cit [↑](#footnote-ref-20)
20. Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal 27 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid, hal 20 [↑](#footnote-ref-22)
22. I Wayan Parthiana. Op.cit, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-23)
23. Abdussalam,op.cit, hal 4 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid, hal 242 [↑](#footnote-ref-25)
25. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, PT Alumni, 2003 hal.36 [↑](#footnote-ref-26)
26. Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung, Refika Aditama, 2007, hal. 42 [↑](#footnote-ref-27)
27. J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, SInar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 43. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibid, 258-259 [↑](#footnote-ref-29)
29. Supt. Budiman Parangin-angin, 2006, Mutual Legal Assistance (MLA), Majalah Interpol, hlm. 59 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ibid, NCB-Indonesia. [↑](#footnote-ref-31)
31. Anis Widyawati, Op. Cit., Hlm. 135 [↑](#footnote-ref-32)
32. Divhubinter Polri, Op. Cit., Hlm. 36 [↑](#footnote-ref-33)
33. Ibid. [↑](#footnote-ref-34)
34. Anis Widyawati, Op. Cit., Hlm. 135-136 [↑](#footnote-ref-35)
35. Divhubinter Polri, Op. Cit., Hlm. 37. [↑](#footnote-ref-36)
36. Ibid [↑](#footnote-ref-37)
37. Ibid., Hlm. 38 [↑](#footnote-ref-38)
38. Ibid. [↑](#footnote-ref-39)
39. Ibid. [↑](#footnote-ref-40)
40. Ibid. [↑](#footnote-ref-41)
41. Ibid., Hlm 50-51 [↑](#footnote-ref-42)
42. Ibid. [↑](#footnote-ref-43)
43. Ibid. [↑](#footnote-ref-44)
44. Ibid., Hlm. 79. [↑](#footnote-ref-45)
45. Ibid., Hlm. 80. [↑](#footnote-ref-46)
46. Ibid. [↑](#footnote-ref-47)
47. Ibid., Hlm. 81. [↑](#footnote-ref-48)
48. Ibid. [↑](#footnote-ref-49)
49. Ibid., hlm. 112. [↑](#footnote-ref-50)
50. Ibid. [↑](#footnote-ref-51)
51. Ibid. [↑](#footnote-ref-52)
52. Ibid. [↑](#footnote-ref-53)